

**SKRIPSI**

**PERSPEKTIF KESETARAAN GENDER**

**TERHADAP KEMAJUAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**(Studi Kasus PKK Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur)**

**ELSA PURWANINGSIH**

Nomor Induk Mahasiswa : 10564 11018 17



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2021**

**PERSPEKTIF KESETARAAN GENDER TERHADAP KEMAJUAN  
PEMBANGUNAN DAERAH  
(Studi Kasus PKK Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur)**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Ilmu Pemerintahan**

**Disusun Dan Diajukan Oleh  
ELSA PURWANINGSIH  
NIM : 105641101817**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2021**

06/09/2021

-  
lexp  
smb. Alumni

-  
R/0105/IPM/2100  
PUR  
P'

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Perspektif Kesetaraan Gender Terhadap Kemajuan  
Pembangunan Daerah ( Studi kasus PKK Kecamatan  
Tomoni Kabupaten Luwu Timur )

Nama Mahasiswa : Elsa Purwaningsih

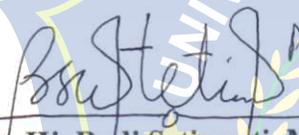
Nomor Induk Mahasiswa : 105641101817

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II

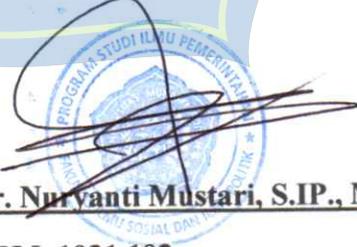
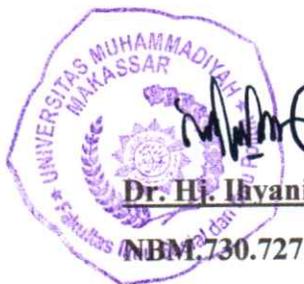
  
Dr. Hj. Budi Setiawati, M.Si

  
Ahmad Harakan, S.IP., M.HI

Mengetahui :

Dekan Fisip  
Unismuh

Ketua Program Studi  
Ilmu Pemerintahan



Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si  
NBM.1031.102

## PENERIMA TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/Undangan Menguji Skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 0202/FSP/A.3-VIII/VIII/43/2021 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada Hari Kamis 26 Agustus 2021.

### TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris



**Dr.Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si**



**Dr.Burhanuddin, S.Sos., M. Si**

### Penguji

1. Dr. Hj. Budi Setiawati, M.Si (Ketua)
2. Dra. Hj. ST. Nurmaeta, MM
3. Dr. Muhammad Yahya, M.Si
4. Ahmad Harakan, S.IP, M.H.I



## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Elsa Purwaningsih  
Nomor Induk Mahasiswa : 105641101817  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi dengan judul **“Perspektif Kesetaraan Gender terhadap Kemajuan Pembangunan Daerah ( Studi Kasus PKK Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur)”** adalah sepenuhnya karya sendiri. Tidak ada bagian di dalam nya yang merupakan plagiat dari orang lain,tidak melakukan penciplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang di jatuhkan kepada saya apabila kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketika keilmuan dalam karya ilmiah ini ,atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya ini .

Makassar,...Juli 2021

Yang Menyatakan

Elsa Purwaningsih

## ABSTRAK

**ELSA PURWANINGSIH (2021) “Perspektif Kesetaraan Gender terhadap Kemajuan Pembangunan Daerah (Studi Kasus PKK Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur)” (dibimbing oleh : Budi Setiawati dan Ahmad Harakan)**

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dikemukakan untuk mengetahui hasil bagaimana perspektif kesetaraan gender terhadap kemajuan pembangunan daerah di Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur melalui organisasi PKK. Kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan Pertahanan dan Keamanan Nasional (Hankamnas), serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian studi kasus dengan jenis penelitian kualitatif fokus penelitian ini berfokus pada teori model Harvard terhadap empat indikator dalam teori ini yaitu : akses, partisipasi, kontrol dan manfaat.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Perspektif Kesetaraan Gender Terhadap Kemajuan Pembangunan Daerah di Kabupaten Luwu Timur melalui beberapa aspek yaitu akses perempuan dalam kemajuan daerah didasarkan pada pedoman umum penyelenggaraan gender di daerah, partisipasi keterlibatan mental dan emosional serta fisik dalam perencanaan, kontrol dan manfaat terhadap kemajuan daerah di Kabupaten Luwu Timur.

Kata kunci : kesetaraan gender, pembangunan daerah, organisasi PKK

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh Segala syukur dan nikmat atas karunia Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Perspektif Kesetaraan Gender terhadap Kemajuan Pembangunan Daerah ( Studi Kasus PKK Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur)” yang merupakan suatu syarat penyelesaian studi Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis tentunya hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan yang disengaja maupun kesalahan yang tidak disengaja, termasuk dalam penulisan skripsi ini yang tentunya menemui hambatan, dan kesulitan sehingga untuk menjadi lebih baik membutuhkan doa dan dukungan yang merupakan perantara penulis dengan sang pencipta baik yang secara langsung maupun secara tidak langsung. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis menyadari skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis ayahanda Saijo dan Ibunda Sukati senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tiada henti dan tanpa pamrih. Dan

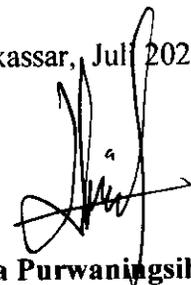
saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Ibu Dr.Hj Budi Setiawati, M.Si selaku pembimbing I (satu) dan Bapak Ahmad Harakan, S.IP., M.HI selaku pembimbing II (dua) yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat selesai.
2. Kepala Bidang seksi Kesetaraan Gender Dinas Sosial Kabupaten Luwu Timur, Ketua PKK Kecamatan Tomoni dan seluruh pengurus PKK Kecamatan Tomoni, serta masyarakat yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi informan penulis selama proses penelitian berlangsung.
3. Bapak Prof. DR. H. Ambo Asse, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si.
5. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Ibu Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si.

6. Teman-teman penulis yang tak hentinya memberi dukungan moril dan mendampingi penulis disegala kondisi.
7. Sahabat-sahabat dan sepupu saya : Puji Astuti dan Irwahyu Prasadah yang telah memberikan dukungan moril dan dorongan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Senior senior Ilmu Pemerintahan kak Taufik Abdillah dan Kak Farida Utami yang senantiasa memberikan masukan masukan kepada penulis
9. Teman-teman IP 017 yang sama-sama berproses dan berjuang untuk sebuah cita-cita mulia. Yang tiada hentinya memberi dukungan kepada penulis agar menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman kelas IP A yang senantiasa memberi dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini sangatlah jauh dari kesempurnaan karena segala sesuatu yang sempurna itu hanya milik Allah SWT dan oleh karena itu demi kesempurnaan skripsi ini, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, Juli 2021



**Elsa Purwaningsih**

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Persetujuan .....</b>	<b>i</b>
<b>Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah .....</b>	<b>ii</b>
<b>Abstrak.....</b>	<b>iii</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>iv</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Konsep Kesetaraan Gender.....	11
C. Konsep Pembangunan Sumber Daya Manusia.....	22
D. Perempuan Dalam Pembangunan.....	24
E. Kerangka Pikir.....	27
F. Fokus Penelitian .....	28
G. Deskripsi fokus penelitian .....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Waktu Dan Lokasi Penelitian .....	30
B. Jenis Dan Tipe Penelitian.....	30
C. Sumber Data.....	31
D. Informan Penelitian.....	32
E. Teknik Pengumpulan Data .....	33
F. Teknik Analisa Data .....	34
G. Teknik Pengabsahan Data.....	35

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Deskripsi Objek Penelitian ..... 37

B. Perspektif Kesetaraan Gender Terhadap Kemajuan Pembangunan  
Daerah di Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur  
Melalui Organisasi PKK..... 55

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 82

B. Saran ..... 83

**DAFTAR PUSTAKA**..... 84

**LAMPIRAN**..... 86



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kesetaraan gender telah lama diperjuangkan oleh pejuang feminis diberbagai negara termasuk Indonesia. hal tersebut tidak terlepas dari problematika dari kaum perempuan sendiri, dimana adanya anggapan bahwa perempuan kurang atau bahkan tidak dapat memainkan peran independen dalam tataran domestik publik. posisi perempuan selalu dikaitkan dengan lingkungan yang berhubungan dengan urusan keluarga dan rumah tangga, sementara posisi laki-laki sering dikaitkan dengan lingkungan publik, yang berhubungan dengan urusan di luar rumah. dalam posisi seperti ini, perempuan sulit mengimbangi posisi laki-laki.

Di sebagian besar wilayah Indonesia, perempuan dapat dikatakan sebagai sumber daya manusia yang penting namun cenderung terabaikan. padahal sebenarnya dalam perjalanan sejarah Indonesia diberbagai wilayah peranan perempuan tidak bisa diabaikan. Indonesia mempunyai tokoh-tokoh perempuan yang pernah memegang peranan penting pada berbagai bidang, termasuk dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia di berbagai wilayah nusantara.

Bermula dari zaman kolonial sudah muncul sosok perempuan, yaitu RA Kartini yang memelopori kesetaraan gender sejak tahun 1908, sehingga sampai sekarang antara laki-laki dan perempuan memiliki peran yang sama dalam

berbagai aspek kehidupan. namun, hal tersebut tidak terlepas dari konteks cara pandang kita yang sesuai dengan kodrat perempuan itu sendiri. pada masa itu, RA Kartini memperjuangkan nasib perempuan agar memiliki kesamaan hak antara laki laki dan perempuan khususnya dalam bidang pendidikan sebagai wujud perlawanan atas ketidakadilan terhadap kaum perempuan.

Di Indonesia, khususnya perempuan di Sulawesi Selatan memiliki peran yang cukup sentral dalam menopang perjuangan mempertahankan kemerdekaan. peran tersebut dilakoni dengan mendirikan organisasi dan kelaskaran perjuangan. Salah satunya yaitu Opu Daeng Risaju yang meniti perjuangannya sejak tahun 1927 ketika mendirikan organisasi Partai Syarckat Islam Indonesia (PSII) Cabang Pare-pare. (Sondarika, dalam Bahri, dkk, 2019)

Opu Daeng Risaju merupakan sosok perempuan hebat dari tanah Luwu yang di beri gelar bangsawan, gelar tersebut diberikan atas dedikasinya dalam mempertahankan dan membawa dacrahnya keluar dari tekanan Belanda. dalam perjuangannya, Opu Daeng risaju kemudian mendirikan cabang PSII Palopo yang diresmikan pada 14 Januari 1930 melalui rapat akbar. hal tersebut dapat terlihat jelas bagaimana seorang perempuan mampu memberikan kontribusi bagi dacrahnya. dapat pula dikatakan bahwa, perempuan pada masa itu memang memperlihatkan bagaimana kesetaraan gender itu dapat terlaksana atas usaha yang mereka lakukan sebagaimana usaha yang dikerjakan oleh laki- laki.

Pada tahun 1999 pemerintah pusat menyetujui pemekaran daerah tingkat II Luwu menjadi 2 ( Dua ) kabupaten dacrach tingkat II Luwu Utara. Pada tahun 2000 terdapat pengusulan pemekaran Luwu Utara menjadi 2 (dua) wilayah

Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Luwu Timur, yang merupakan prakarsa hak inisiatif DPRD Luwu Utara. tahun 2003 Kabupaten Luwu Timur terbentuk dari hasil pemekaran dari Kabupaten Luwu Utara maka secara administratif Kabupaten Luwu Timur berdiri sendiri sebagai daerah otonom yang memiliki kewenangan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. namun secara kultural, historis dan hubungan emosional sebagai satu rumpun keluarga tanah Luwu tetap terjalin sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan.

Kabupaten Luwu Timur merupakan salah satu daerah tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan yang di sahkan dengan undang-undang nomor 7 tahun 2003 dan terdiri atas 11 (sebelas) Kecamatan, yaitu Malili, Angkona, Tomoni, Tomoni Timur, Kalaena, Towuti, Nuha, Wasponda, Wotu, Burau dan Mangkutana. Untuk mewujudkan Kabupaten Luwu Timur yang terkemuka, di tahun 2020 pemerintah mengangkat beberapa prioritas pembangunan, seperti pembangunan manusia melalui peningkatan kualitas layanan dasar dan penanggulangan kemiskinan, pemantapan pertumbuhan ekonomi daerah melalui akselerasi pembangunan, pengembangan ekonomi kerakyatan, pemantapan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, pengembangan kawasan strategi daerah dan pelestarian sumber daya alam serta lingkungan hidup.

Kesetaraan gender dalam kebijakan pembangunan menjadi salah satu indikator yang cukup signifikan, karena kesetaraan gender akan memperkuat kemampuan suatu daerah atau negara untuk berkembang dan mengurangi kemiskinan. semakin besar anggaran pemberdayaan perempuan dalam proses

perencanaan pembangunan, maka semakin besar upaya suatu daerah atau negara untuk menekan angka kemiskinan. sebaliknya, kurangnya anggaran untuk kepentingan perempuan mengenai kesetaraan gender dalam pembangunan maka angka kemiskinan disuatu daerah atau negara akan meningkat.

Sebagian besar perempuan di Kabupaten Luwu Timur mempunyai peran ganda dalam rumah tangga, seperti halnya mencari nafkah untuk keluarga. problem yang banyak terjadi adalah dalam pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan, karena kurangnya pemahaman konsep gender dalam rumah tangga maupun dalam masyarakat membuat perempuan tidak memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan dan menganggap pekerjaan wanita hanya sebatas mengurus rumah dan keluarga.

Untuk meningkatkan peran serta dalam kesetaraan gender, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menggelar kegiatan pembinaan bagi organisasi perempuan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, meningkatkan kapasitas dan kapabilitas organisasi perempuan yang ada di Luwu Timur, serta mengembangkan komunikasi dan sinergitas program dalam membangun jejaring kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang bertujuan untuk membangkitkan kemampuan masyarakat sebagai wujud pemberdayaan, perlu memberi peluang dan partisipasi perempuan, bukan hanya sebagai objek tetapi juga sebagai subjek dalam pembangunan. (<http://koranseruya.com>, 2019). pemberdayaan perempuan merupakan paradigma pembangunan yang memfokuskan perhatiannya pada aspek yang prinsipil. untuk membangkitkan

kemampuan sebagai wujud pemberdayaan, perlu memberi peluang dan partisipasi kepada perempuan. hal ini menunjukkan bahwa organisasi perempuan sebaiknya bersinergi dengan pemerintah agar dapat mendukung dan memberikan kontribusi untuk kesejahteraan rakyat

Dalam mewujudkan kesetaraan gender pemerintah telah membentuk kementerian urusan peranan wanita dalam kabinet sejak Era Orde Baru pada tahun 1978. sedangkan Kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dibentuk sejak 1957 sebagai organisasi mandiri dan diselipkan di bawah asuhan menteri dalam negeri. ideologinya adalah "Panca Dharma Wanita" artinya perempuan sebagai pendamping suami, ibu pendidik anak, pengatur rumah tangga, sebagai pekerja penambah penghasilan keluarga, dan sebagai anggota masyarakat yang berguna.

PKK memiliki konsep sebagai organisasi yang melibatkan partisipasi antara perempuan dan laki-laki yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga. hal ini dikarenakan keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang berpengaruh besar terhadap kinerja pembangunan dalam mendukung program pemerintah. dari keluarga yang sejahtera ini, maka tata kehidupan berbangsa dan bernegara akan dapat melahirkan ketentraman, keamanan, keharmonisan, dan kedamaian. dengan demikian, kesejahteraan keluarga menjadi salah satu tolak ukur dan barometer dalam pembangunan program pemerintah.

Dalam mewujudkan program pemerintah, organisasi tersebut merekrut anggota sampai lapisan bawah masyarakat. hal tersebut diharapkan mampu

membawa pada kondisi keluarga yang sejahtera, yaitu keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan dasar manusia baik secara material, sosial, mental dan spiritual serta keluarga yang berdaya atau keluarga yang hidup sejahtera, maju dan mandiri. hal tersebut bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan. namun, pada kenyataannya organisasi tersebut belum sepenuhnya mampu merubah kondisi keluarga dan perempuan, sehingga belum terwujud kesetaraan dan keadilan gender.

Selama ini, organisasi kaum perempuan di Kabupaten Luwu Timur (Lutim) sudah ada, namun eksistensinya belum terasa. hal ini disebabkan kiprah kaum perempuan baik dibidang ekonomi, politik, sosial dan pendidikan dianggap masih sangat kurang. ini terjadi karena kaum perempuan masih banyak yang belum faham apa itu kesetaraan gender. meski pemerintah sudah membuka ruang lewat beberapa regulasi tetapi dianggap belum maksimal misalnya dibidang politik perwakilan kaum perempuan masih dianggap kurang mampu untuk bisa bersaing, sehingga dalam hal pengambilan keputusan sangat minim. selain itu perlakuan kasar terhadap kaum perempuan baik di dalam rumah tangga hingga di muka umum masih kerap terjadi. sehingga kaum perempuan di dukung dengan adanya peraturan menteri negara pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Republik Indonesia nomor 1 tahun 2011 tentang strategi nasional sosial budaya untuk mewujudkan kesetaraan gender.

Perkembangan PKK di Kabupaten Luwu Timur masih memiliki banyak kekurangan dan juga berdampak hingga ketinggian kecamatan, terkhusus di Kecamatan Tomoni yang memiliki 14 (empat belas) desa, terdapat beberapa desa

yang masih kurang aktif dalam kegiatan ini, terutama di desa terpencil yang jaraknya jauh dari kantor Kecamatan. banyaknya anggota PKK dari Desa yang kurang aktif dan minim kesadaran hal ini dikarenakan tidak ada gaji yang diberikan dalam kegiatan ini atau hanya sukarela tutur Sawen selaku PKK Pokja II Kecamatan Tomoni.

Dari uraian permasalahan diatas maka penulis merasa permasalahan yang diangkat menarik untuk diteliti terkait kesetaraan gender dengan melihat sejauh mana perempuan di Luwu Timur terutama ibu-ibu rumah tangga ini diberdayakan dan mampu mengembangkan potensinya melalui PKK salah satunya di Kecamatan Tomoni yang memiliki desa terpencil /plosok jauh dari kota maupun kantor camat yang membuat masyarakat malas menghadiri kegiatan. ditambah dengan masalah dana karna kegiatan ini hanya bersifat sukarela atau tidak ada gaji. sehingga, banyak perempuan yang dilarang atau tidak diperbolehkan oleh suaminya untuk mengikuti kegiatan ini dengan alasan tidak mendapatkan keuntungan dan hanya membuang waktu. dengan demikian peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Perspektif Kesetaraan Gender terhadap Kemajuan Pembangunan Daerah di Kabupaten Luwu Timur”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk melihat bagaimana Perspektif Kesetaraan Gender di Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

Bagaimana Perspektif Kesetaraan Gender terhadap Kemajuan Pembangunan Daerah di Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur melalui organisasi PKK?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya maka tujuan dari penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

Untuk mengetahui Perspektif Kesetaraan Gender terhadap Kemajuan Pembangunan Daerah di Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur melalui organisasi PKK

## **D. Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan Tujuan dan Rumusan masalah diatas, maka Manfaat dari Penelitian ini yaitu:

### **1. Manfaat Teoritis**

Selain untuk memperluas wawasan dan pengetahuan serta menambah pengalaman bagi penulis, juga sebagai salah satu sarana berfikir untuk bahan pembelajaran dan berlatih. Hasil penelitian ini, diharapkan dapat

bermanfaat bagi para pembaca dan dapat menjadi referensi bagi peneliti lainnya.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan mampu memberikan konstribusi pemikiran dan menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan dalam Pemberdayaan Kesctaran Gender terhadap kemajuan Pembangunan di Kabupaten Luwu Timur yang berpihak pada Kepentingan Perempuan.



## BAB II

### TINJUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

No	Judul Skripsi	Nama	Hasil Penelitian
1.	Kebijakan dinas pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak (DP3A) dalam pengarusutamaan gender Di Sulawesi selatan	Muhammad Tri Purna P	Dalam hasil penelitian ini melihat Kebijakan PUG (pengarusutamaan gender) di Provinsi Sulawesi Selatan sudah memadai meskipun Pergub tentang Pelaksanaan Perda PUG belum diundangkan, Perda PUG belum dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan sehingga pelaksanaan PUG masih lambat di lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Pelaksanaan PUG di OPD masih lambat, dibuktikan dengan belum optimalnya pemenuhan 7 (tujuh) prasyarat PUG.
2.	Persepsi masyarakat terhadap kesetaraan gender Di desa buku kecamatan mapilli kabupaten polewali Mandar provinsi Sulawesi barat	Ifa Chaerunnisyah	Hasil penelitian tentang Persepsi Masyarakat terhadap Kesetaraan Gender di Desa Buku Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat antara lain: a. Kata gender merupakan kata baru yang didengar masyarakat di Desa Buku, masyarakat lebih mengenal kata <i>sibaliparri</i> dalam bahasa Mandar. Menurut masyarakat di Desa Buku kesetaraan gender sangat bagus diterapkan dalam rumah tangga karena adil dalam pembagian kerja dan musyawarah dalam mengambil keputusan. Kesetaraan gender yang terjadi di Desa Buku adalah saling pengertian, saling bertanggung jawab, saling ikhlas, penuh dengan kasih sayang, harmonis, adil demi kelanggengan dan kesejahteraan rumah tangga dan dalam masyarakat. b. Bentuk-bentuk kesetaraan dan ketidaksetaraan gender yang terjadi

			<p>pada masyarakat di Desa Buku, adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Bentuk-bentuk Kesetaraan Gender       <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Pembagian kerja yang adil bagi laki-laki dan perempuan</li> <li>b) Saling bertanggung jawab dalam rumah tangga</li> <li>c) Saling memahami dan mengerti.</li> </ol> </li> </ol>
3.	Kesetaraan gender dalam tulisan r. A. Kartini Perspektif pendidikan islam	Eka Mulyani	<p>Kesetaraan Gender Dalam Tulisan R. A. Kartini Perspektif Pendidikan Islam semangat yang diperjuangkan Kartini menjadi tujuan pendidikan Islam dalam membebaskan perempuan untuk mengenyam pendidikan dan tulisan-tulisan Kartini memperkuat adanya prinsip-prinsip pendidikan Islam yang keduanya sama-sama mengangkat derajat perempuan dengan pendidikan</p>

Berdasarkan ketiga penelitian terdahulu terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian saat ini dimana perbedaannya terletak pada fokus penelitian seperti yang sudah dijelaskan peneliti bahwa penelitian ini berfokus pada salah satu organisasi di Kabupaten Luwu Timur yaitu PKK, untuk mengetahui Bagaimana Perspektif Kesetaraan Gender terhadap Kemajuan Daerah di Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur melalui organisasi PKK.

## B. Konsep Kesetaraan Gender

### 1. Pengertian Kesetaraan Gender

Gender merupakan suatu sifat yang dijadikan dasar untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari kondisi sosial dan budaya, nilai dan perilaku, mentalitas dan emosi serta faktor nonbiologis lainnya. secara terminologis, gender biasa didefinisikan sebagai harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan. gender dipandang sebagai suatu konsep kultural yang

dipakai untuk membedakan peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat (Alfian, 2016).

Menurut Julia (2018) didalam bukunya yang berjudul gender dan pembangunan mengatakan bahwa gender merupakan seperangkat perang yang seperti halnya kostum dan topeng di teater, menyampaikan kepada orang lain bahwa kita adalah feminisme atau maskulin. perangkat perilaku khusus ini yang mencakup penampilan, sikap, kepribadian, bekerja didalam dan diluar rumah tangga, seksualitas dan tanggung jawab keluarga.

Menurut perspektif gender bahwa indikator kesejahteraan dan kemajuan manusia adalah sama dan tidak dibedakan serta diskriminasi (Abdullah, 2016). hal ini berarti, peran, fungsi, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan disebuah daerah bisa jadi berbeda dengan fungsi, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan didaerah lain.

Kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan Pertahanan dan Keamanan Nasional (Hankamnas), serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut (Achmad, 2019).

Menurut Puspitawati dalam Ema (2016) bahwa kesetaraan gender adalah kondisi perempuan dan laki-laki untuk menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak asasi dan

potensinya bagi pembangunan disegala bidang kehidupan. dapat disimpulkan bahwa kesetaraan gender merupakan hak yang semestinya didapatkan agar laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan ikut berpartisipasi dalam bidang kehidupan.

Dari kedua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kesetaraan gender merupakan hak yang semestinya didapatkan agar laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan ikut berpartisipasi dalam bidang kehidupan. dengan demikian, terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki. Keduanya mempunyai hak yang sama dalam memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan. pada akhirnya laki-laki dan perempuan akan memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan tersebut.

Teori mengenai kesetaraan gender pada dasarnya didorong oleh teori-teori feminis. Sebagaimana dikatakan Humm dalam (Mutrofin & Irvan, 2019), teori feminis cenderung mengandung tiga unsur atau asumsi pokok berikut ini: pertama, gender adalah suatu konstruksi yang menekan kaum perempuan sehingga cenderung menguntungkan laki-laki, kedua, konsep patriarki (dominasi kaum laki-laki dalam lembaga-lembaga sosial) melandasi konstruksi tersebut, ketiga, pengalaman dan pengetahuan kaum perempuan harus dilibatkan guna mengembangkan suatu masyarakat non-seksis dimasa mendatang.

## 2. Upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender

Menurut (Effendi & Ratnasari, 2018) terdapat beberapa upaya untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender, baik dari segi intern dan ekstern, yakni:

- a. Segi intern perempuan sudah banyak yang menyadari akan pentingnya untuk memajukan diri dan berkembang dalam segala bidang. contohnya sudah banyak perempuan yang menuntut ilmu dari pendidikan dasar sampai gelar tertinggi dalam dunia pendidikan. dari sisi intern perempuan sendiri, banyak perempuan yang telah secara sukarela terjun di ranah politik baik dengan menjadi calon legislatif atau eksekutif di daerah maupun dipusat. demikian pula dalam bidang militer, jabatan komandan dalam kesatuan juga tidak sedikit yang diduduki oleh perempuan.
- b. Segi ekstern ini merupakan peran masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan pemerintah.
  - 1) Masyarakat Sebagai bagian dari kelompok sosial, masyarakat telah melakukan upaya-upaya untuk menempatkan perempuan pada posisi yang sesuai dengan porsinya. seperti dalam susunan organisasi karang taruna di desa, perempuan juga banyak yang menjadi ketua dan wakil ketua karang taruna. demikian pula adanya organisasi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) desa yang didalamnya beranggotakan ibu-ibu yang terlibat langsung dalam penyampaian aspirasi dan pengambilan

keputusan atas masalah-masalah tertentu sesuai dengan lingkup PKK.

- 2) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Banyak LSM yang bergerak dibidang perlindungan dan peningkatan kesetaraan gender. seperti yayasan perempuan Indonesia, yayasan kakak, yayasan srikandi dan sebagainya. dalam kegiatannya, perempuan banyak dilibatkan sehingga mampu mengembangkan kemampuan intelektual dan keterampilannya.
- 3) Pemerintah telah mengeluarkan instruksi Presiden nomor 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender. dengan adanya instruksi yang diperintahkan pada segenap departemen dan instansi khusus ini, presiden berharap agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan lancar.

### **3. Analisis dan Peran Gender**

Menurut Widjajanti (2016) didalam bukunya yang berjudul penelitian dan pengarusutamaan gender mengatakan bahwa analisis gender merupakan proses penting didalam penerapan pendekatan gender. terapat dua hal penting. yang pertama analisis gender yang berupa indikator Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat (APKM). melalui indikator ini dapat dilihat baik secara kuantitatif maupun kualitatif apa yang terjadi pada laki-laki dan perempuan dalam intervensi pembangunan atau program berjalan. melalui indikator ini, kita dapat melihat ketimpangan, marginalisasi, kesenjangan dan lainnya antara laki-laki dan perempuan dalam situasi sosial yang sama. analisis gender memiliki

beberapa variasi namun yang digunakan oleh mekanisme Anggaran Responsif Gender (ARG) adalah analisis *Harvard*.

Analisis *Harvard* adalah mekanisme menyaring data yang diperoleh melalui analisis gender. tahapan selanjutnya adalah memetakan masalah gender. untuk mempermudah memetakan masalah dipergunakan indikator yang diperoleh dari analisis gender model *Harvard*. Analisis *Harvard* adalah analisis gender yang mempertanyakan siapa yang memiliki akses dan kontrol terhadap sumber daya atau intervensi pembangunan (kebijakan/program/kegiatan/dana). analisis gender terdiri dari empat fokus analisis, yaitu:

- a. Akses, merupakan indikator yang memperlihatkan apakah intervensi pembangunan memberi ruang atau membuka pintu bagi laki-laki dan perempuan untuk terlibat dan mendapatkan manfaat dari intervensi tersebut.
- b. Partisipasi, merupakan indikator yang menunjukkan apakah laki-laki dan perempuan terlibat secara nyata dalam proses intervensi tersebut. bila tidak, kendala apa yang dihadapi?
- c. Kontrol, merupakan indikator yang menunjukkan apakah laki-laki dan perempuan mampu mempengaruhi pengambilan keputusan terkait dengan intervensi tersebut atautkah hanya laki-laki saja?
- d. Manfaat, merupakan indikator yang mengangkat apakah intervensi itu menguntungkan laki-laki dan perempuan? Keuntungan manakah yang bertambah, atau mana yang menguntungkan untuk laki-laki (atau

merugikan) dan mana yang akan menguntungkan (atau merugikan) perempuan.

Model *Harvard* merupakan salah satu aspek penting dalam analisis metode Gender *Analysis Pathway* (GAP) yang direkomendasikan secara nasional. Indikator *Harvard* menjadi elemen dari analisis *pathway* sehingga dapat dilihat dan dibedah melalui keempat faktor tersebut. Analisis gender mengandung muatan sebagai berikut:

- a. Adanya gambaran kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat antara perempuan dan laki-laki dalam isu atau tema penelitian.
- b. Adanya gambaran mengenai faktor penghambat internal lembaga (organisasi pemerintah) dan atau eksternal dimasyarakat.
- c. Indikator outcome yang dapat dihubungkan dengan tujuan kegiatan/ sub kegiatan.
- d. Indikator input atau output yang dapat dihubungkan dengan bagian pelaksana kegiatan/sub kegiatan.

Menurut Aida (2011) pada level masyarakat, tipe masyarakat mempresentasikan peran yang ditampilkan oleh seorang perempuan. Analisis peran perempuan dapat dilakukan dari perspektif posisi mereka dalam berurusan dengan pekerjaan produktif tidak langsung dan pekerjaan produktif langsung yaitu sebagai berikut:

1. Peran tradisi, menempatkan perempuan dalam fungsi reproduksi (mengurus rumah tangga, melahirkan dan mengasuh anak serta

mengayomi suami). Hidupnya 100% untuk keluarga pembagian kerja sangat jelas yaitu perempuan di rumah dan lelaki di luar rumah.

2. Peran transisi, mempolakan peran tradisi lebih utama dari peran yang lain pembagian tugas mengikuti aspirasi gender, tetapi eksistensi mempertahankan keharmonisan dan urusan rumah tangga tetap tanggung jawab perempuan.
3. Dwiperan, memposisikan perempuan dalam kehidupan dua dunia yaitu menempatkan peran domestik dan publik dalam posisi sama penting. dukungan moral suami pemicu ketegaran atau sebaliknya keengganan suami akan memicu keresahan atau bahkan menimbulkan konflik terbuka atau terpendam.
4. Peran egalitarian, menyita waktu dan perhatian perempuan untuk kegiatan diluar. dukungan moral dan tingkat kepedulian lelaki sangat hakiki untuk menghindari konflik kepentingan pemilahan dan pendistribusian peranan. jika tidak yang terjadi adalah masing-masing saling berargumentasi untuk mencari pembenaran atau menumbuhkan ketidaknyamanan suasana kehidupan keluarga.
5. Peran kontemporer, adalah dampak pilihan perempuan untuk mandiri dalam kesendirian. jumlahnya belum banyak akan tetapi benturan demi benturan dari dominasi lelaki atas perempuan yang belum terlalu peduli pada kepentingan perempuan mungkin akan meningkatkan populasinya.

#### 4. Gender dalam Pembangunan

Kesetaraan gender menjadi perhatian masyarakat dunia, seperti juga di Indonesia. berbagai gerakan, baik dilevel internasional maupun nasional, berupaya untuk mewancanakan dan mewujudkan kesetaraan gender. isu gender dalam pembangunan dapat diamati dari berabagai segi (Widjajanti, 2016).

- a. Melalui kesepakatan global tentang status perempuan.
- b. Melalui pendekatan penerapan gendera dalam pembangunan
- c. Kenyataan bahwa perempuan Indonesia sudah bergerak sebelum isu perempuan diangkat sebagai isu global.

Darwin dalam Widjajanti (2016) menggambarkan pendekatan yang digunakan untuk meningkatkan status perempuan sebagai berikut.

- a. Perempuan dalam pembangunan (*Women in Development/WID*)

WID merupakan model yang pertama kali diterapkan. model ini merupakan strategi pembangunan yang meletakkan perempuan sebagai asset dan sasaran sehingga cenderung fokus pada isu perempuan saja. dalam konteks ini, perlu digaris bawahi bahwa perempuan bukan beban pembangunan. model ini diterapkan dengan cara:

- 1) Meningkatkan produktivitas dan penapatan perempuan
- 2) Memperbaiki kemampuan perempuan untuk mengatur rumah tangga
- 3) Mengintegrasikan perempuan dalam proyek dan meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan
- 4) Meningkatkan kesehatan perempuan.

Secara umum, *women in development* (WID) berupaya meningkatkan peran reproduksi maupun produksi perempuan. Lebih lanjut, model ini memang dapat meningkatkan angka partisipasi perempuan dalam pembangunan, namun belum dapat memperbaiki tingkat keberdayaan mereka. artinya, perempuan sering kali masih menjadi objek pelecehan dan kekerasan, baik di ruang publik, seperti lingkungan kerja, maupun di ruang privat, seperti rumah tangga. dengan demikian WID dianggap belum mampu merombak struktur maupun budaya sosial yang bias gender.

b. Gender dan Pembangunan (*Gender and Development/GAD*)

Model ini merupakan respon dari kegagalan WID. Jika WID memfokuskan gerakannya pada perempuan sebagai realitas biologis yang dianggap berdiri sendiri, GAD memfokuskan gerakannya pada hubungan gender dalam kehidupan social. Model ini mengupayakan kesetaraan gender dalam hal substansial, seperti

- 1) Pemberian akses yang sama dalam pendidikan sebagai upaya mendasar terjadinya perubahan nilai social dan transfer ilmu pengetahuan dan keterampilan
- 2) Pengakuan hak-hak perempuan (misalnya hak reproduksi) sebagai bagian integral hak asasi manusia
- 3) Pemberian kemandirian ekonomi yang sama, termasuk akses terhadap dunia kerja, gaji, serta pendistribusian asset yang sama
- 4) Pemberian akses yang sama dalam politik dan posisi yang strategis dalam pengambilan keputusan yang memungkinkan

pengidentifikasi kebijakan yang dapat dinikmati laki-laki dan perempuan secara seimbang.

c. Pengarusutamaan Gender (Gender *Mainstreaming*/GM)

Model ini merupakan pematangan GAD yang bertujuan menjadikan gender sebagai arus utama pembangunan. Model ini melibatkan negara sebagai pembuat kebijakan dan masyarakat sebagai partisipan aktif melalui berbagai institusinya. Mekanismenya melalui gender *scan*, yaitu gender sebagai alat pemindai untuk mengetahui penerapan pengarusutamaan gender dalam sebuah organisasi dengan menguji:

- 1) Kesamaan akses kontrol sumber daya antara laki-laki dan perempuan diorganisasi
- 2) Sensitivitas gender dalam pengembangan perencanaan dan kebijakan organisasi
- 3) Kebutuhan strategi gender
- 4) Stereotipe gender
- 5) Kesamaan gender di organisasi
- 6) Hubungan gender.

## 5. Gender dan Tradisi Masyarakat Lokal

Menurut (Abdullah, 2016) gender sebagai bentuk konstruksi sosial diatur berdasarkan system nilai social budaya atau tradisi yang sudah diskriminasi gender memberikan pemahaman terpola dalam kehidupan masyarakat. salah satu bentuk tradisi dan system nilai social budaya yang berpengaruh terhadap peran gender adalah budaya patriarki.

Nilai ideologi patriarkhi menunjukkan bahwa laki-laki adalah segalanya, berkuasa patut didahulukan, pengambilan keputusan utama, penentu segalanya. Nilai ideology ini pula merambah sampai keluar lingkup keluarga kelingkup public yang juga mempengaruhi berbagai aspek kehidupan perempuan (Pandu dalam (Abdullah, 2016)).

Budaya patriarki ini lah yang melegitimasi peran laki-laki dan perempuan dalam kehidupan masyarakat. pembagian peran laki-laki dan perempuan ini antara lain:

- a. Laki-laki berkiprah dilingkup publik di luar rumah, seperti perannya mencari nafkah dimana mereka mendapat peluang dan kesempatan untuk mengembangkan karier.
- b. Perempuan berkiprah dilingkup domestic dalam rumah tangga melakukan pekerjaan rumah tangga, yang tidak menghasilkan pendapatan yang nyata dan tidak mengenal jenjang karier.

### **C. Konsep Pembangunan Sumber Daya Manusia**

Pembangunan Manusia merupakan suatu proses untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia (UNDP dalam (Nurkholis, 2018)). teori ini dicetuskan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) untuk memperbaiki konsep analisis sumber daya manusia sebelumnya yang berlandaskan produk domestik bruto atau rata-rata pendapatan perkapita.

Menurut UNDP dalam (Nurkholis, 2018) pendapatan rata-rata tidak secara detail menggambarkan kondisi sumberdaya manusia disuatu wilayah. Hal ini

karena kesenjangan antara penduduk kaya dan miskin cenderung tinggi, sehingga penduduk yang pada dasarnya miskin akan terduga memiliki kesejahteraan lebih tinggi.

Pembangunan manusia muncul pada tahun 1990 untuk memperbaiki pengukuran tersebut. Sejumlah premis dasar konsep ini adalah:

1. Pembangunan harus mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian.
2. Pembangunan dimaksudkan untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi penduduk, tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka. Oleh karena itu konsep pembangunan manusia harus terpusat pada penduduk secara keseluruhan, dan bukan hanya pada aspek ekonomi saja.
3. Pembangunan manusia memperhatikan bukan hanya pada upaya meningkatkan kemampuan (kapabilitas) manusia tetapi juga dalam upaya-upaya memanfaatkan kemampuan manusia tersebut secara optimal.
4. Pembangunan manusia didukung oleh empat pilar pokok, yaitu: produktifitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan.
5. Pembangunan manusia menjadi dasar dalam penentuan tujuan pembangunan dan dalam menganalisis pilihan-pilihan untuk mencapainya.

Sementara itu, pembangunan manusia dalam mencapai tujuan akhirnya memperhatikan empat hal utama, yaitu:

### 1. Produktifitas

Produktifitas penduduk berkaitan dengan *human capital* yang dimiliki dan investasi manusia dilakukan untuk meningkatkannya.

### 2. Pemerataan

Penduduk memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial. semua hambatan yang memperkecil kesempatan untuk memperoleh akses tersebut harus dihapus.

### 3. Kestinambungan

Pembangunan yang dilakukan tidak hanya untuk mencukupi kebutuhan saat ini tapi juga masa depan.

### 4. Pemberdayaan

Penduduk harus berpartisipasi penuh dalam keputusan dan proses yang akan menentukan kehidupan mereka.

## **D. Perempuan dalam Pembangunan**

Perempuan sekarang tidak lagi seperti perempuan zaman dahulu yang hanya memiliki peran di rumah. perempuan sekarang mampu mengembangkan potensinya yang membuatnya sejajar dengan kaum lelaki. banyak pekerjaan-pekerjaan yang dahulu menjadi milik mayoritas kaum lelaki, sekarang mulai banyak perempuan yang mengambil peran itu. dalam beberapa posisi, tak jarang perempuan menjadi seorang pemimpin, dimana di antara yang dipimpin olehnya ada laki-laki.

Menurut Caroline Moser dalam Mosse (2018), pendekatan terhadap perempuan dan pembangunan (*women and development*) yang berkembang dari kepedulian terhadap persamaan, pendekatan persamaan adalah pendekatan yang mengakui bahwa :

Perempuan merupakan partisipasi aktif dalam proses pembangunan, yang melalui peran produktif dan reproduktifnya memberikan kontribusi kritis, meski tidak diakui, terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan bangsa merupakan strategi yang berupaya untuk meningkatkan kepedulian akan aspirasi kepentingan dan peranan semua warga masyarakat tidak terkecuali perempuan. pemikiran tentang peran perempuan dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor: (1) kodrat dari tuhan. wanita sebagai kodratnya mempunyai kodrat secara biologis haid, melahirkan, menyusui; (2) tatanan sosial dan kebudayaan pada masyarakat. keadaan budaya dan tatanan masyarakat di Indonesia yang beragam menimbulkan ketidakseragaman dalam kajian jender, sehingga mengarah kepada pandangan diskriminasi yang umumnya di alami perempuan dalam pembangunan (Suhita, 2015).

Menurut Suhita (2015), gender didefinisikan menjadi empat program wanita dalam kehidupan keluarga dan masyarakat yang mencakup:

1. Kedudukan dan peran, dilihat dari dua perspektif: (a) peran produktif, yaitu peran yang dilakukan oleh seseorang menyakut pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa baik untuk dikonsumsi maupun untuk diperdagangkan. peran ini disebut disektor publik, (b) peran reproduktif,

adalah peran yang dijalankan oleh seseorang untuk kegiatan yang berkaitan dengan pemeliharaan sumber daya manusia dan pekerjaan urusan rumah tangga, seperti mengasuh anak, memasak, dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga lainnya. peran ini disebut juga peran disektor domestik.

2. Beban kerja dan kegiatan, adalah pembagian beban yang diberikan masyarakat dimana perempuan dan laki-laki melakukan jenis pekerjaan tertentu yang berbeda berdasarkan ciri-ciri social yang diberikan atas keduanya.
3. Saling keterkaitan dan ketergantungan. peranan perempuan dalam pembangunan akan terwujud apabila hal ini didukung oleh perilaku saling menghargai atau menghormati, saling bantu membantu, saling pengertian dan saling peduli dan saling membutuhkan antara pria dan wanita.
4. Tingkat akses dan kontrol dalam rangka pengkajian kepekaan gender, dipengaruhi oleh beberapa faktor missal: kondisi ekonomi, demografi, social, budaya, Norma yang berlaku di masyarakat, Ketentuan Undang-undang dan pendidikan.

Menurut Ayu dalam (Probosiwi, 2015) Kebijakan dalam pelaksanaan sasaran pembangunan perempuan meliputi beberapa hal berikut

1. Peningkatan kualitas perempuan sebagai sumber daya pembangunan.
2. Peningkatan kualitas dan perlindungan tenaga kerja perempuan.
3. Peningkatan peran ganda perempuan dalam keluarga dan masyarakat.

4. Pengembangan iklim sosial dan budaya yang mendukung kemajuan perempuan.
5. Pembinaan kelembagaan dan organisasi perempuan.

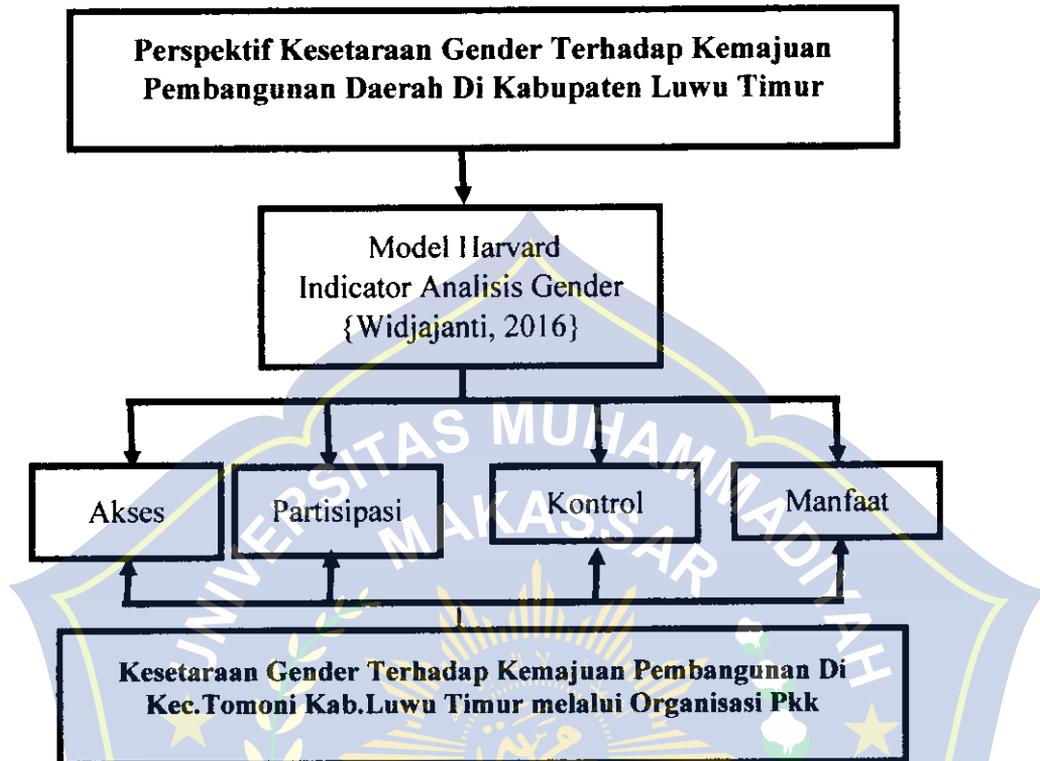
#### **E. Kerangka Pikir**

Kerangka pikir merupakan suatu gambaran penelitian yang berlandaskan teori tentang apa yang akan digunakan dalam penelitian. berdasarkan judul penelitian “Perspektif Kesetaraan Gender Terhadap Kemajuan Pembangunan Daerah (Studi Kasus PKK Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur)”

Kerangka pikir dalam penelitian ini menggunakan teori Model Harvard. untuk melihat bagaimana Perspektif Kesetaraan Gender Dalam Kemajuan Pembangunan Daerah di Kabupaten Luwu Timur, terdapat empat indikator dalam teori ini yaitu: akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dimana keempat indikator ini yang nantinya digunakan untuk melihat Kesetaraan Gender terhadap Kemajuan pembangunan di Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur melalui organisasi PKK.

Adapun akan digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut.

**Gambar 2.1**  
**Bagan Kerangka Pikir**



#### **F. Fokus Penelitian**

Penelitian ini berfokus pada Perspektif Kesetaraan Gender terhadap Kemajuan Pembangunan Daerah di Kabupaten Luwu Timur. dimana peneliti akan memfokuskan pada kesetaraan gender terhadap kemajuan pembangunan daerah di Kabupaten Luwu Timur dengan melihat bagaimana masyarakat terkhususnya kaum perempuan ikut berperan aktif dalam memajukan daerahnya. Salah satunya dengan memberdayakan kaum perempuan untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki melalui program pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK)

### **G. Deskripsi Fokus Penelitian**

Deskripsi fokus dalam penelitian ini mengenai Perspektif Kesetaraan Gender terhadap Kemajuan Pembangunan Daerah di Kabupaten Luwu Timur yang mencakup empat indikator analisis gender. Keempat indikator tersebut yaitu

1. Akses, yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu untuk melihat apakah organisasi PKK di Kecamatan Tomoni memberi ruang atau membuka ruang kepada perempuan untuk terlibat dan mendapatkan manfaat dari kegiatan tersebut.
2. Partisipasi, yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu, untuk melihat apakah perempuan terlibat secara nyata dalam proses kegiatan PKK di Kecamatan Tomoni tersebut. Jika tidak, kendala apa yang dihadapi?
3. Kontrol, yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu, untuk melihat apakah organisasi PKK Kecamatan Tomoni aktif dalam mengontrol dan mengendahkan organisasi tersebut
4. Manfaat, yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu, apakah organisasi PKK Kecamatan Tomoni menguntungkan bagi perempuan, keuntungan manakah yang bertambah atau mana yang menguntungkan dan mana yang akan merugikan perempuan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Adapun waktu penelitian ini selama 2 bulan sejak tanggal 14 April 2021 s.d 14 Juni 2021 setelah seminar proposal dan lokasi penelitian di Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur terkait perspektif kesetaraan gender terhadap kemajuan pembangunan daerah studi kasus PKK. Adapun alasan memilih lokasi penelitian tersebut untuk mempelajari dan mengetahui bagaimana program pemerintah tentang gender berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

#### **B. Jenis dan Tipe Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Creswell dalam Ahmad (2015) merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna mengajukan pertanyaan-pertanyaan, prosedur, juga untuk memperoleh data yang real atau terperinci dari partisipan, melakukan analisis data dari tema-tema yang khusus sampai umum dan menafsirkan makna data, serta membuat laporan hasil akhir sebuah penelitian yang memiliki kerangka terstruktur dan fleksibel.

## 2. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. adapun data deskriptif yang dimaksud adalah ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subjek itu sendiri). dalam penelitian kualitatif tidak ditemukan adanya angka-angka yang dianalisis menggunakan alat statistik, melainkan data diperoleh dari penelitian deskriptif. deskriptif artinya digunakan untuk mengungkap sebuah fakta empiris secara objektif ilmiah dengan berlandaskan pada logika disiplin keilmuan penulis yakni Ilmu Politik.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, ada pun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fenomenologi. fenomenologi adalah fenomena yang ada berkaitan langsung dan dilakukan oleh peneliti yang menggambarkan fakta. (Sugiyono, 2016)

### C. Sumber Data

Sumber Data yang digunakan ada 2 macam yaitu:

#### 1. Data Primer

Data Primer adalah data-data yang dikumpulkan oleh informan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dipinjam dan bukan data yang diambil pertama oleh peneliti, dan akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian.

#### D. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian kualitatif ini merupakan suatu langkah yang akan ditempuh oleh peneliti agar data dan informasi dapat diperoleh. Kerena itu, peneliti harus bias menentukan informan dan mendapatkan informan. Bungin (2011). dalam penelitian ini yang akan peneliti jadikan informan dalam peneliti yaitu:

**Tabel 3.1 Informan Penelitian**

No	Nama	Inisial	Jabatan	Jumlah
	Rezki Afrianti, S.KM	RA	Dinas Sosial (Kepala Seksi Kesetaraan Gender ) Kabupaten Luwu Timur	1
	Asriani Safitri Ridwan, S.E	AS	Ketua PKK di Kecamatan Tomoni	1
	Sri Endang, S.Pd	SE	Kader PKK di Kecamatan Tomoni	1
	Fitrianingsih	F	Kader PKK di Kecamatan Tomoni	1
	Fitri Hanafi	FH	Masyarakat di Kecamatan Tomoni	1
	Hijrah	H	Masyarakat di Kecamatan Tomoni	1
<b>TOTAL</b>				<b>6</b>

Kabupaten Luwu Timur merupakan salah satu daerah penempatan transmigrasi di Provinsi Sulawesi Selatan. dalam perannya dalam memberdayakan para perempuan, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur terus komitmen dalam upaya meningkatkan peran serta dalam kesetaraan gender. pemerintah daerah dan organisasi perempuan terus berperan dalam rangka memajukan kualitas masyarakat di kabupaten Luwu Timur.

Yang akan Peneliti jadikan Informan dalam Penelitian yaitu:

1. Dinas Sosial (kepala seksi kesetaraan gender ) kabupaten luwu timur yaitu orang yang dijadikan sebagai informan untuk memperoleh informasi-informasi akurat mengenai PKK dan gender sehingga peneliti dapat memberikan dan menyajikan hasil penelitian dengan baik dan tepat.
2. Ketua PKK Kecamatan Tomoni yaitu orang yang membantu pemerintah Desa atau Lurah dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga dan bertanggung jawab pada semua kegiatan yang dilaksanakan dan salah satu informan peneliti dalam memberikan informasi mengenai PKK yang dilaksanakan oleh desa maupun kabupaten.
3. Masyarakat yang dimaksud dalam hal ini yaitu Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi penduduk di Kabupaten Luwu Timur.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara sipenanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan panduan wawancara.

## 2. Observasi

Observasi merupakan suatu pengamatan yang dilakukan baik secara langsung, gambaran yang dapat dilakukan ataupun rekaman suara. pedoman observasi berisikan tentang kegiatan yang akan diamati oleh peneliti.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat. didalam melaksanakan metode dokumentasi, penelitian menyelidiki benda-benda tertulis, seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat dan sebagainya.

## F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu analisis yang didasarkan oleh data yang diperoleh, dikembangkan, disusun dan disimpulkan dalam sebuah penelitian, sehingga mudah dipahami. model menganalisis data menurut Miles dan Huberman (sugiyono, 2016) terdapat komponen pokok yaitu:

### 1. *Data Reduction* (reduksi data)

Reduksi data merupakan data yang diperoleh oleh peneliti dari lapangan yang jumlahnya cukup banyak, dengan begitu maka perlu adanya pencatatan secara teliti dan terperinci. seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, semakin lama sebuah peneliti kelapangan, maka jumlah data yang didapat akan semakin banyak kompleks dan rumit. untuk itu, segera dilakukan penganalisisan data reduksi. dalam artian merangkum, memilih hal-hal yang

pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema serta polanya.

## 2. Penyajian data atau *Data Display*

Miles dan Huberman (sugiyono, 2016) menyatakan yang sering sekali digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif yaitu dengan menggunakan teks yang bersifat naratif.

## 3. *Conclusion Drawing or Verification* (penarikan kesimpulan atau verifikasi)

Penarikan kesimpulan yang hasilnya tidak konsisten dari penelitian yang dilakukan pertama kali, maka penelitian itu memiliki kecenderungan bersifat sementara dan cenderung berubah-ubah. hal ini akan terjadi jika kesimpulan tersebut tidak didasari bukti yang kuat.

## G. Keabsahan Data

Salah satu cara yang digunakan untuk menguji kredibilitas data yaitu dengan cara *triangulasi* (bermacam-macam). menurut sugiyono (2016) mengatakan bahwa *triangulasi* dalam pengujian kredibilitas dapat diartikan sebagai pengecekan sebuah data dari berbagai sumber dan berbagai cara serta berbagai waktu.

1. *Triangulasi* sumber, dalam hal ini akan dilakukan dengan cara peneliti mengecek data yang sudah diperoleh dari beberapa sumber.
2. *Triangulasi* data atau *Data Display*, yaitu pengecekan kembali penelitian menggunakan teknik yang berbeda dengan sumber data yang sama.

3. *Triangulasi waktu*, yang akan dilakukan dengan cara peneliti harus melakukan pengecekan kembali kelokasi pada kondisi yang berbeda dengan menggunakan teknik pengumpulan data.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Objek Penelitian

##### 1. Kabupaten Luwu Timur

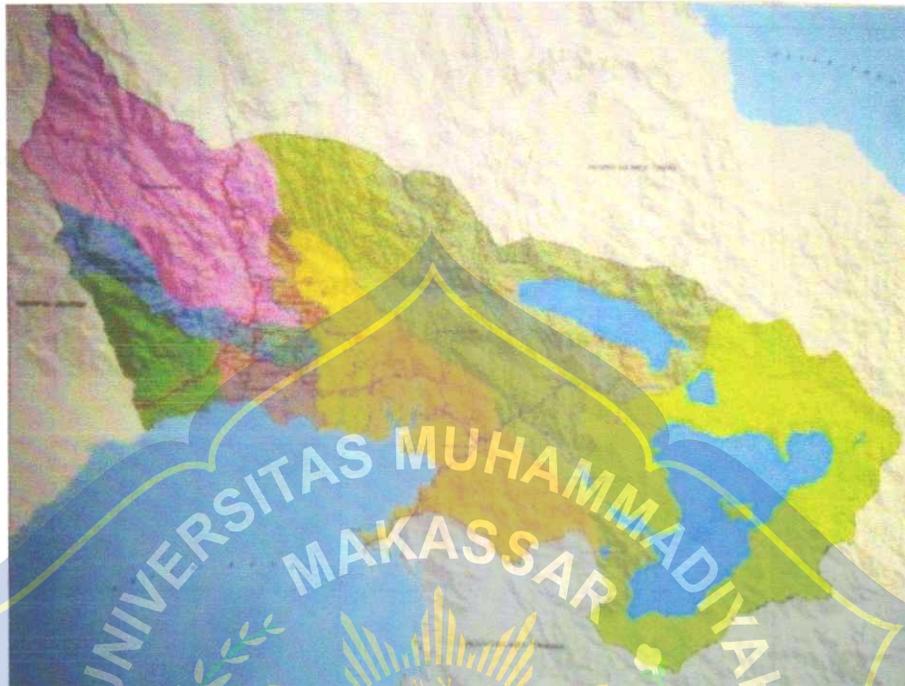
###### a. Keadaan Geografis

Secara geografis, Kabupaten Luwu Timur berada di sebelah selatan garis khatulistiwa, tepatnya terletak di antara 2°03'00" - 3°03'25" Lintang Selatan dan 119°28'56" - 121°47'27" Bujur Timur. Kabupaten Luwu Timur merupakan kabupaten paling timur di Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas sebelah utara dan sebelah timur adalah Provinsi Sulawesi Tengah. Batas sebelah selatan adalah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Teluk Bone. Sementara itu, batas sebelah barat kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan.

Kabupaten Luwu Timur yang ibu kotanya adalah Malili, mempunyai luas wilayah 6.944,38 km<sup>2</sup> atau meliputi sekitar 11,14 persen dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Secara administrasi Kabupaten Luwu Timur dibagi menjadi 11 kecamatan yaitu Kecamatan Mangkutana, Nuha, Towuti, Malili, Angkona, Wotu, Burau, Tomoni, Tomoni Timur, Kalaena dan Wasuponda. Kecamatan Towuti merupakan kecamatan yang memiliki wilayah terluas mencapai 1.820,48 km<sup>2</sup> atau sekitar 26,21 persen dari luas wilayah Kabupaten Luwu Timur.

**Gambar 4.1.**

Peta Administrasi Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan



(Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur, 2020)

Terdapat 13 sungai yang mengalir di wilayah Kabupaten Luwu Timur. Sungai terpanjang adalah Sungai Kalaena dengan panjang 85 km. Sungai tersebut melintas di Kecamatan Mangkutana, sedangkan sungai terpendek adalah Sungai Bambalu dengan panjang 15 km. Selain itu, di Kabupaten Luwu Timur juga terdapat 5 danau. Kelima danau tersebut adalah Danau Matano yang berada di Kecamatan Nuha, sedangkan Danau Mahalona, Danau Towuti, Danau Taparang Masapi, dan Danau Lontoa berada di Kecamatan Towuti. Danau yang terdalam adalah Danau Matano (589 m) dan danau yang terluas adalah Danau Towuti (585 km<sup>2</sup>).

#### b. Sosial Budaya

Masyarakat Kabupaten Luwu Timur memiliki sistem kekerabatan dan pelapisan sosial seperti yang terdapat dimasyarakat bugis lainnya yang

dihuni oleh orang-orang bugis di Sulawesi Selatan. Orang Luwu Timur dalam sistem kekerabatan mereka mengikuti pola hubungan kekerabatan yang bersifat bilateral atau parental yaitu semua pihak dalam keluarga, baik kerabat istri maupun kerabat suami mempunyai hak yang sama dalam penyelenggaraan bahtera rumah tangga. Hal ini berarti pula baik istri maupun suami mempunyai hak yang sama atas rumah tangga mereka.

Demikian pula dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Kabupaten Luwu Timur banyak dipengaruhi oleh agama, adat istiadat dan kebiasaan yang telah dilakukan secara turun temurun. Disamping itu Nilai-nilai kebersamaan masih sangat kental, nilai-nilai kegotong-royongan masih terlihat ditengah masyarakat, serta perayaan hari-hari besar keagamaan, mereka dengan penuh kesadaran dan kerelaan saling bantu-membantu.

c. Agama

Dalam kehidupan beragama masyarakat Luwu Timur dikenal sangat religius dan hal tersebut sejalan dengan visi pembangunan Kabupaten Luwu Timur yaitu “Keberlanjutan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Publik di Kabupaten Luwu Timur Menuju Kabupaten Terkemuka Tahun 2021”.

Mayoritas penduduk Luwu Timur menganut agama islam, kemudian Hindu dan Kristen Protestan. Dibawah ini dapat dilihat jumlah pemeluk agama berdasarkan banyaknya penduduk menurut kecamatan dan agama. Untuk Kabupaten Luwu Timur, jumlah tertinggi agama yang dianut adalah agama Islam (229.653 jiwa), disusul kemudian pemeluk agama Kristen

(46.950 jiwa), Hindu (16.910 jiwa) dan katolik (6.855 jiwa). Sedangkan agama Budha dan Aliran Kepercayaan lainnya merupakan minoritas dari keseluruhan agama/kepercayaan yang ada.

**Tabel. 4.1** Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama di Kabupaten Luwu Timur

Kecamatan	Agama						Jumlah Penduduk
	Islam	Kristen	Khatolik	Hindu	Budha	Lainnya	
Mangkutana	12.451	8.997	1.062	13	0	0	22.523
Nuha	19.601	3.584	471	113	0	0	23.769
Towuti	33.829	7.173	1.268	121	0	0	42.391
Malili	39.751	2.341	245	544	1	0	42.882
Angkona	16.202	1.835	618	6.721	1	0	25.377
Wotu	29.174	1.989	526	1.879	0	1	33.569
Burau	28.706	4.756	373	1.360	1	1	35.197
Tomoni	21.775	4.454	314	34	1	0	26.578
Tomoni Timur	5.698	2.952	452	4.597	0	0	13.699
Kalena	9.139	1.595	108	1.495	0	0	12.337
Wasuponda	13.327	7.274	1.418	33	0	0	22.052
<b>Kab. Luwu Timur</b>	<b>229.653</b>	<b>46.950</b>	<b>6.855</b>	<b>16.910</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>300.374</b>

(Sumber: Profil Gender dan Anak Kabupaten Luwu Timur, 2020)

Diketahui bahwa jumlah penduduk yang menganut agama tertentu, maka pemerintah akan lebih mudah dalam hal perencanaan penyediaan sarana dan prasarana peribadatan serta perencanaan program kegiatan yang berkaitan dengan kerukunan antar umat beragama.

**Tabel. 4.2** Jumlah Tempat Ibadah Tiap Agama di Kabupaten Luwu Timur

Kecamatan	Agama				
	Islam	Kristen	Khatolik	Hindu	Budha
Mangkutana	32	54	7	0	0
Nuha	14	12	1	1	0
Towuti	26	14	1	0	0
Malili	67	5	5	3	0
Angkona	63	15	3	19	0
Wotu	43	19	1	6	0
Burau	72	30	2	5	0
Tomoni	30	22	2	0	0
Tomoni Timur	9	15	3	13	0
Kalena	23	16	3	9	0
Wasuponda	22	14	1	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>401</b>	<b>238</b>	<b>33</b>	<b>56</b>	<b>0</b>

(Sumber: Profil Gender dan Anak Kabupaten Luwu Timur, 2020)

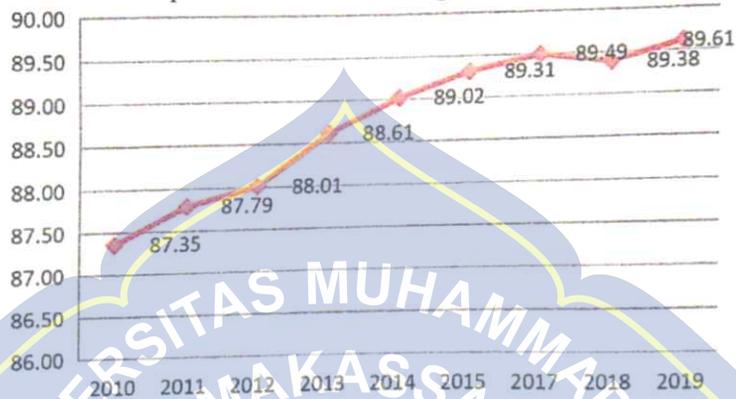
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa di Kabupaten Luwu Timur telah dibangun beberapa tempat ibadah untuk masing-masing agama di tiap Kecamatan. Sebagai agama mayoritas Rumah Ibadah umat Islam memiliki jumlah yang terbanyak yang tersebar di 11 Kecamatan. Untuk Penganut Agama Hindu paling banyak terdapat di Kecamatan Angkona yang mayoritas penduduknya beragama Hindu.

#### d. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan salah satu ukuran tingkat keberhasilan capaian pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender. IPG adalah ukuran pembangunan manusia berbasis gender dilihat dari tiga dimensi capaian dasar manusia yaitu dimensi umur

panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Luwu Timur mengalami Tren Peningkatan dari Tahun ke Tahun dapat dilihat pada Grafik Berikut:

**Grafik 4.1.** Tren Capaian Indeks Pembangunan Gender Kab. Luwu Timur



(Sumber: Profil Gender dan Anak Kabupaten Luwu Timur, 2020)

Berdasarkan sebaran capaian IPG diketahui bahwa dari 24 kabupaten/kota Tahun 2019 Kabupaten Luwu Timur masih tergolong rendah yaitu pada peringkat ke 17 dari seluruh Kab/ Kota. Kabupaten Sinjai memiliki IPG memiliki capaian IPG tertinggi yaitu 98.20, dan Kabupaten Toraja Utara memiliki nilai IPG terendah yaitu 86.78. Maknanya, Kabupaten Luwu Timur masih didorong dalam peningkatan akses dan partisipasi perempuan disektor politik, publik dan ekonomi.

**Grafik 4.2.** Capaian Indeks Pembangunan Gender Kab/Kota se Sulawesi Selatan



(Sumber: Profil Gender dan Anak Kabupaten Luwu Timur, 2020)

e. Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menunjukkan apakah wanita dapat secara aktif berperan serta dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG menitikberatkan pada partisipasi, dengan cara mengukur ketimpangan gender dibidang ekonomi, partisipasi politik, dan pengambilan keputusan. Metode penghitungan IDG masih mengacu pada metodologi lama sampai Indeks Ketidaksetaraan Gender (IKG) bisa dihitung, meliputi dimensi keterwakilan diparlemen, pengambilan keputusan, dan distribusi pendapatan. Indikator pengukurannya adalah 1) Proporsi keterwakilan laki-laki dan perempuan diparlemen, 2) Proporsi laki-laki dan perempuan sebagai manajer, staf administrasi, pekerja profesional dan teknisi, serta 3) Upah buruh laki-laki dan perempuan disektor non pertanian.

**Grafik 4.3.** Tren Capaian Inde Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Luwu Timur



(Sumber: Profil Gender dan Anak Kabupaten Luwu Timur, 2020)

Diketahui bahwa capaian Indeks Pemberdayaan Gender di Kabupaten Luwu Timur selama kurun waktu 2017 - 2019 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini memberikan gambaran kepada kita, bahwa secara umum upaya pemberdayaan perempuan di bidang politik,

publik, dan ekonomi telah menunjukkan keberhasilan, meskipun belum terjadi peningkatan yang signifikan di 3 bidang tersebut.

## 2. Kecamatan Tomoni

### a. Keadaan Geografis

Kecamatan Tomoni memiliki luas wilayah 230,09 km<sup>2</sup> atau sekitar 3,31 persendari total luas wilayah Kabupaten Luwu Timur. Kecamatan yang terletak di sebelah barat ibu kota Kabupaten Luwu Timur ini berbatasan langsung dengan Kecamatan Mangkutana disebelah utara Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Tomoni Timur. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Wotu dan Burau dan disebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Luwu Utara. Kecamatan Tomoni terdiri dari 12 desa dan 1 kelurahan yang seluruh desa/kelurahannya berstatus desa definitif. Wilayah Kecamatan Tomoni adalah daerah yang seluruh desanya merupakan wilayah bukan pantai. Secara topografi wilayah Kecamatan Tomoni sebagian besar daerahnya merupakan daerah datar. Terdapat satu sungai yang mengalir Kecamatan ini yaitu sungai Tomoni.

**Gambar 4.2.** Peta Administrasi Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur



(Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur, 2020)

b. Pemerintahan

Pada tahun 2018 di Kecamatan Tomoni terdapat 52 dusun dengan 117 RT dan 4 RK. Pada Tahun yang sama pula tercatat sebanyak 204 lembar surat nikah yang telah dikeluarkan khusus untuk pemeluk Agama Islam. Sampai dengan tahun 2018 tercatat sebanyak 83 orang pegawai negeri sipil (PNS) di lingkup Kecamatan Tomoni. Dari jumlah tersebut sebanyak 20 persen (32 orang) merupakan PNS golongan II, 39 persen (32 orang) golongan III dan masing-masing sebanyak 3 persen (3 orang) merupakan golongan IV dan golongan. Berdasarkan Tingkat pendidikannya, PNS di lingkup Kecamatan Tomoni sebagian besar merupakan lulusan pendidikan tinggi. Dari 83 pegawai yang ada terdapat 35 pegawai atau sekitar 57 persen lulusan S1, 16 pegawai merupakan lulusan Diploma atau sekitar 30 persen, sebanyak 3 pegawai atau 13 persen merupakan lulusan S2, sisanya sekitar 5 persen merupakan lulusan SLTA.

c. Pendidikan

Fasilitas pendidikan di Kecamatan Tomoni relative lengkap. Sarana pendidikan informal (Taman Kanak-Kanak/TK) dan sarana pendidikan formal dari tingkat SD sampai SLTA telah tersedia. Pada tahun 2018, jumlah TK di Kecamatan Tomoni sebanyak 16 unit (1 negeri dan 15 swasta) sedangkan jumlah SD 16 unit (2 swasta dan 14 negeri) Jenjang SLTP 3 unit (2 negeri dan 1 swasta), dan SLTA masing-masing 2 unit (1 SMU negeri dan 1 SMK negeri) Rasio murid guru memberikan gambaran rata-rata banyaknya murid yang diajar oleh seorang guru. Angka rasio ini dapat

digunakan untuk mengukur tingkat efektifitas guru dalam proses belajar mengajar. Pada tahun ajaran 2017/2018 rasio murid guru SD sebesar 15 murid setiap guru. Sedangkan rasio untuk jenjang pendidikan SLTP dan SLTA masing-masing sebesar 24 dan 22 siswa setiap gurunya.

d. Kesehatan

Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Tomoni telah memadai. Hal tersebut ditandai dengan adanya Puskesmas yang terletak di desa Mandiri ditunjang 11 poskesdes yang tersebar di desa-desa. Jumlah tempat praktek dokter yang ada di kecamatan ini sebanyak 5 tempat praktek sedangkan jumlah tempat praktek bidan yang tersedia sebanyak 4 tempat praktek. Selanjutnya, tenaga medis yang tersedia adalah 3 dokter dan 17 bidan. Salah satu cara untuk menekan laju pertumbuhan penduduk adalah melalui program KB. Pada tahun 2018 tercatat sebanyak 2.240 wanita usia 15-49 tahun yang berstatus kawin dan sedang menggunakan KB. Pada tabel 4.2.7 dapat dilihat banyaknya akseptor aktif KB menurut alat kontrasepsi yang digunakan. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Badan P2KB Kabupaten Luwu Timur, alat kontrasepsi yang paling banyak menggunakan oleh akseptor Aktif KB di Kecamatan Tomoni adalah suntik, yaitu sebanyak 1252 orang atau sekitar 33-53 persen.

e. Agama

Mayoritas penduduk Kecamatan Tomoni beragama Islam. Kondisi ini antara lain dapat dilihat dari banyaknya tempat ibadah bagi umat Islam seperti tersedia 32 mesjid dan 22 mushalah/langgar. Selain itu di Kecamatan Tomoni terdapat komunitas masyarakat yang memeluk agama Kristen dengan jumlah tempat ibadah sebanyak 26 gereja.

f. Perumahan dan Lingkungan

Pada umumnya masyarakat Kecamatan Tomoni menggunakan sumur sebagai sumber air minum utama. Sementara itu, sebagai bahan bakar untuk memasak, kayu bakar masih menjadi pilihan utama. Bangunan rumah di Kecamatan Tomoni masih ada sebagian yang belum permanen yaitu sebanyak 2.322 rumah, sedangkan rumah semi permanen dan permanen masing-masing sebanyak 1.643 dan 2.114 rumah.

## g. Data Umum PKK Kecamatan Tomoni

Tabel 4.3 Data Umum PKK Kecamatan Tomoni

No	Nama Desa	Jumlah Kelompok				Jumlah		Jumlah Jiwa	
		Dusun / Lingk	PK K RW	PK K RT	DASA WISMA	KRT	KK	L	P
1	Kel. Tomoni	0	0	0	32	774	837	1.632	1.714
2	Tadulako	0	0	0	12	263	294	516	518
3	Bangun Karya	0	0	0	15	331	391	711	683
4	Bayondo	0	0	0	16	376	434	744	800
5	Beringin Jaya	0	0	0	16	525	565	1.041	1.022
6	Lestari	0	0	0	33	842	968	1.521	1.528
7	Mulyasri	0	0	0	22	740	884	1.417	1.390
8	Bangun Jaya	0	0	0	12	666	793	1.313	1.306
9	Mandiri	0	0	0	15	637	753	1.467	1.496
10	Sumber Alam	0	0	0	7	211	230	382	376
11	Kalpataru	0	0	0	9	368	421	843	768
12	Rante Mario	0	0	0	18	413	425	845	728
13	Ujung Baru	0	0	0	12	236	285	492	429
Kecamatan Tomoni		0	0	0	-	-	-	-	-
Jumlah		0	0	0	219	6.382	7.280	12.924	12.758

(Sumber: Dokumen Program Kerja PKK Kec. Tomoni 2020)

## h. Progra Kerja TP PKK Kecamatan Tomoni

Tabel 4.4. Program Kerja Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila  
TP PKK Kecamatan Tomoni

	Nama Wilayah	Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila							
		PKBN		PKDRT		POLA ASUH		LANSIA	
		Jml Klp Simulasi	Jml Angt	Jml Klp Simulasi	Jml Angt	Jml Klp	Jml Angt	Jml Klp	Jml Angt
1	Kel. Tomoni	0	0	0	0	0	0	1	57
2	Tadulako	0	0	0	0	0	0	1	20
3	Bangun Karya	0	0	0	0	0	0	1	60
4	Bayondo	0	0	0	0	0	0	1	30
5	Beringin Jaya	0	0	0	0	0	0	1	65
6	Lestari	0	0	0	0	1	289	1	220
7	Mulyasri	0	0	0	0	0	0	3	50
8	Bangun Jaya	0	0	0	0	1	15	4	63
9	Mandiri	0	0	0	0	3	0	1	37
10	Sumber Alam	0	0	0	0	1	7	1	63
11	Kalpataru	0	0	0	0	2	8	1	46
12	Rante Mario	0	0	0	0	0	0	1	39
13	Ujung Baru	0	0	0	0	0	0	0	0
Kecamatan Tomoni		0	2	1	0	0	0	0	0
Jumlah		0	0	0	0	8	319	18	793

(Sumber: Dokumen Program Kerja PKK Kecamatan Tomoni 2020)

Tabel 4.5. Progra Kerja Gotong Royong TP PKK Kecamatan Tomoni

No	Nama Wilayah	Gotong Royong				
		Jumlah Kolompok				
		Kerja Bakti	Rukun Kematian	Keagaman	Jimpitan	Arisan
1	Kel. Tomoni	48	1	4	0	0
2	Tadulako	48	1	3	8	8
3	Bangun Karya	4	3	2	0	0
4	Bayondo	48	1	2	0	0
5	Beringin Jaya	10	2	2	0	0
6	Lestari	0	2	2	0	2
7	Mulyasri	4	1	1	0	0
8	Bangun Jaya	8	2	2	0	6
9	Mandiri	3	3	3	0	0
10	Sumber Alam	28	1	2	5	2
11	Kalpataru	21	2	2	8	4
12	Rante Mario	3	3	3	0	0
13	Ujung Baru	6	2	2	0	0
Kecamatan Tomoni		0	0	0	0	0
Jumlah		0	231	24	5	21

(Sumber: Dokumen Program Kerja PKK Kecamatan Tomoni 2020)

Tabel 4.6. Program Kerja Pendidikan Keterampilan TP PKK Kecamatan Tomoni

No	Nama Wilayah	Pendidikan Keterampilan													Jumlah Kader Yg Sdh Dilatih			
		Jumlah Warga Yang Masih Buta	Jumlah Kelompok Belajar				Jmi Taman Bacaan	Bkb				Kader Khusus			L P 3 P K K	T P K 3 P K K	DAM AS PKK	
			Pkt A	Pkt B	Pkt C	Paud		Jml Klp.	Jml Ibu Peserta	Jml Ape (Set)	Jml Klp Simulasi Bkb	Tutor Kf	Paud	Bkb				Keterampilan
1	Kel. Tomoni		0	0	0	2	1	1	95	0	1	0	4	5	0	0	0	
2	Tadulako	9	0	0	0	1	1	1	63	1	1	0	0	5	0	0	0	
3	Bangun Karya	17	0	0	0	0	1	1	66	1	1	0	0	5	0	0	0	
4	Bayondo	0	0	0	0	1	1	1	78	0	1	0	0	5	0	0	0	
5	Beringin Jaya	0	0	0	0	0	1	1	67	1	0	0	9	0	0	0	0	
6	Lestari	0	0	13	20	2	1	1	100	1	0	0	1	5	0	0	0	
7	Mulyasri	22	0	0	0	0	1	1	247	1	1	0	1	10	0	0	8	
8	Bangun Jaya	0	0	0	0	1	1	1	126	1	1	0	1	15	0	33	33	65
9	Mandiri	0	0	0	0	1	1	1	64	1	1	0	0	9	0	0	0	
10	Sumber Alam	0	0	0	0	1	1	1	42	1	0	0	6	9	2	0	6	
11	Kalpataru	0	0	0	0	0	1	1	54	0	1	0	0	15	0	0	0	
12	Rante Mario	29	0	0	0	1	1	1	28	1	1	0	0	10	0	0	0	
13	Ujung Baru	0	0	0	0	1	1	1	16	0	1	0	0	2	0	0	0	
Kecamatan Tomoni		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Jumlah		77	0	13	20	11	13	13	1046	9	10	0	22	95	2	33	47	65

(Sumber: Dokumen Program Kerja PKK Kec. Tomoni 2020)

Tabel 4.7. Program Kerja Pengembangan Kehidupan Berkoperasi  
TP PKK Kecamatan Tomoni

No	Nama Wilayah	Pengembangan Kehidupan Berkoperasi									
		Pra Koperasi Usaha Bersama Up2k								Koperasi Berbadan Hukum	
		Pemula		Madya		Utama		Mandiri			
		Jml Kl p	Peserta	Jml Kl p	Peserta	Jml Kl p	Peserta	Jml Kl p	Peserta	Jml Kl p	Jml Anggota
1	Kel. Tomoni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Tadulako	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Bangun Karya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Bayondo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Beringin Jaya	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0
6	Lestari	0	0	0	0	0	0	3	9	0	0
7	Mulyasri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Bangun Jaya	0	0	1	20	0	0	0	0	0	0
9	Mandiri	0	0	0	0	0	0	1	12	0	0
10	Sumber Alam	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0
11	Kalpataru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Rante Mario	0	0	0	0	1	8	0	0	0	0
13	Ujung Baru	0	0	0	0	0	0	2	8	0	0
	Kecamatan Tomoni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	0	0	1	20	1	8	8	37	0	0

(Sumber: Dokumen Program Kerja PKK Kec. Tomoni 2020)

Tabel 4.8. Program Kerja Sandang Pangan TP PKK Kecamatan Tomoni

No	Nama Wilayah	Jumlah Kader			Pangan									Jumlah Industri Rumah Tangga			Jumlah Rumah	
		Pangan	Sandana	Tata Laksana Rumah Tangga	Makanan Pokok		Pemanfaatan Pekarangan / Hatinya Pkk							Pangan	Sandana	Jasa	Sehat Dan Layak Huni	Tidak Sehat Dan Tidak Layak Huni
					Beras	Non Beras	Peternakan	Perikanan	Warung Hidup	Lumbung Hidup	Toga	Tanaman Keras						
1	Kel. Tomoni	3	2	0	837	0	265	45	98	67	174	198	11	5	5	746	28	
2	Tadulako	1	0	0	294	0	121	47	89	44	198	287	2	16	4	234	29	
3	Bangun Karya	1	0	0	391	0	219	46	83	57	235	387	5	4	5	298	33	
4	Bayondo	1	0	0	434	0	387	57	86	68	176	396	31	7	18	357	19	
5	Beringin Jaya	5	0	0	565	0	30	40	40	40	65	170	57	13	80	503	22	
6	Lestari	0	0	8	968	0	938	1	38	56	11	831	18	0	21	809	33	
7	Mulyasri	1	1	0	884	0	884	29	31	35	310	853	10	5	10	586	154	
8	Bangun Jaya	0	0	0	793	0	645	71	86	27	125	137	32	17	10	645	21	
9	Mandiri	0	0	0	753	0	22	11	48	16	13	32	34	10	15	598	39	
10	Sumber Alam	8	0	0	230	0	176	23	42	36	45	218	5	5	4	197	14	
11	Kalpataru	1	0	0	421	0	187	34	53	48	87	296	10	3	15	326	42	
12	Rante Mario	0	0	0	425	0	425	50	20	42	15	425	5	3	37	310	103	
13	Ujung Baru	1	0	0	285	0	197	14	43	57	65	276	11	0	5	201	35	
Kecamatan Tomoni		3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Jumlah		25	3	8	7280	0	4496	468	757	593	1519	4506	231	88	229	5810	572	

(Sumber: Dokumen Program Kerja PKK Kec. Tomoni 2020)

Tabel 4.9. Program Kerja Kesehatan dan Kelestarian Lingkungan Hidup  
TP PKK Kecamatan Tomoni

No	Nama Wilayah /Dusun	Jumlah Kader						Kesehatan						Kelestarian Lingkungan Hidup						Perencanaan Sehat					
		Posyandu	Gizi	Kadinas	Penyuluhan Narkoba	Pphc	Kh	Lumlah	Terinotisasi	Posyandu			Jml. Yang Memiliki Kartu Berobat Gratis	Jumlah Rumah Yang Memiliki		Jumlah Krt Yang Menggunakan Air				Jumlah Akseptor Kb Aktif		Jml. Krt Ya Memiliki Tabungan Keluarga			
										Lansia				Taman Perikanan	Sul	Taman Perikanan Samudra	Jumlah Mak	Pdram	Sumur					Lain-Lain	Jumlah Puse
										Jml. Anasola	Jml. Kh	Jml. Kh								Jumlah Puse	Jumlah Wase	L	P		
1	Kel. Tomoni	15	1	2	0	2	2	3	0	1	57	57	772	723	751	3	725	49	0	548	871	9	393	837	
2	Tadulako	5	1	2	0	2	2	1	0	1	20	20	246	212	256	0	245	18	0	164	300	4	131	294	
3	Bangun Karya	10	1	2	0	2	2	2	0	1	60	60	316	267	307	0	302	29	0	233	394	1	178	391	
4	Bayondo	10	1	2	0	2	2	2	1	1	30	30	345	298	346	0	345	31	0	227	367	4	161	434	
5	Beringin Jaya	10	0	0	0	0	0	2	0	1	65	17	525	28	525	0	8	517	0	367	529	9	263	565	
6	Lestari	10	0	0	0	2	0	2	1	1	220	211	780	7	213	0	52	790	0	647	794	36	454	968	
7	Mulyasri	5	0	0	0	0	5	1	0	3	50	50	653	653	740	0	11	729	0	533	733	18	390	489	
8	Bangun Jaya	7	0	0	0	0	5	1	1	4	63	63	666	341	617	0	539	127	0	493	698	20	326	395	
9	Mandiri	5	1	3	0	3	4	1	1	1	37	37	615	587	589	0	621	16	0	478	735	15	282	753	
10	Sumber Alam	5	1	2	1	2	2	1	0	1	63	63	203	156	207	0	198	13	0	138	168	3	98	230	
11	Kalpataru	5	1	2	0	2	4	1	0	1	46	46	347	287	348	0	325	43	0	251	394	6	147	421	
12	Rante Mario	15	1	2	0	2	4	3	0	1	39	39	310	200	145	0	198	266	0	236	375	3	160	425	
13	Ujung Baru	10	1	2	0	2	6	2	0	1	43	43	212	189	156	1	203	33	0	166	236	5	118	285	
Kecamatan Tomoni		0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah		112	9	19	4	21	41	22	4	18	793	736	599	394	520	4	377	266	0	448	559	133	310	548	

(Sumber: Dokumen Program Kerja PKK Kec. Tomoni 2020)

**B. Perspektif Kesetaraan Gender terhadap Kemajuan Pembangunan Daerah di Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur Melalui Organisasi PKK**

Kehidupan demokrasi yang sejati adalah kehidupan dimana semua anggota masyarakat mendapat kesempatan yang sama untuk bersuara dan didengar. Peran serta perempuan dalam ranah politik tentu sangat penting untuk mendorong kebijakan yang berkeadilan sosial, terutama yang berkaitan dengan kaum perempuan dari berbagai bentuk kekerasan baik domestik maupun publik. Walaupun untuk pencapaian itu penuh dengan kendala-kendala yang dihadapi terutama dalam keterlibatan saat proses pembuatan UU, pengawasan dan penyusunan anggaran serta dalam pengambilan kebijakan.

Perempuan dalam hal kebijakan dan kekuasaan masih belum banyak peran serta secara maksimal dalam menentukan kebijakan karena partisipasinya yang masih sedikit, dan secara faktual perempuan tidak memiliki kekuasaan baik formal maupun informal. Fakta dilapangan menyatakan bahwa porsi keterwakilan perempuan ditingkat legislatif maupun Eksekutif yang posisinya pada level pengambilan keputusan (*decition maker*) sangatlah kecil. Padahal keterwakilan perempuan di tingkat DPR dan DPRD, dari segi kuantitas tetap diperlukan untuk memerikan harapan, kekuatan, sekaligus gerakan bagi lahirnya kebijakan dan UU yang mengakomodasikan kebutuhan perempuan yang tidak bisa ditanggalkan lagi kepentingannya. Jika keterwakilan perempuan tercukupi maka pembangunan yang berwawasan gender akan terwujud, sehingga kata-kata ketidaksetaraan gender tidak akan terdengar lagi dalam masyarakat. Perempuan tidak akan terintimidasi lagi dan hak dan aspirasinya akan tersalurkan.

Pembangunan Manusia Indonesia menurut kesetaraan gender menunjukkan tren perbaikan. Ini tercermin dari Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indonesia pada 2018 yang berada di level 90,99 dari skala 0-100. Indeks tersebut naik 0,03 poin persentase dari tahun sebelumnya. Sebagai informasi, IPG mendekati 100 mengindikasikan semakin kecil kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan.

Demikian pula Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Indonesia mengindikasikan perbaikan dan berada di level 71,74 dari skala 0-100 pada 2017. IDG tersebut naik 0,34 poin persentase dari tahun sebelumnya. Membaiknya IDG ini menunjukkan bahwa perempuan Indonesia semakin menunjukkan perannya dalam pembangunan. Ini terbukti dari 17,32% keterwakilan perempuan dalam parlemen serta 46 dalam kepemimpinan profesional pada 2017. IDG merupakan salah satu indikator untuk melihat sejauh mana keterlibatan dan peran aktif perempuan dalam politik dan ekonomi.

Berdasarkan atas hal tersebut maka dirasakan pentingnya peran perempuan dalam pembangunan dengan meningkatkan kuantitas perempuan dalam lembaga parlemen (legislatif), lembaga pemerintahan (Eksekutif), dan lembaga Yudikatif. Diharapkan peran perempuan dapat membawakan atmosfer kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, sehingga keadilan sosial dapat terwujud.

Hasil analisis data penelitian diketahui bahwa perempuan yang menduduki jabatan di Eksekutif dapat dilihat dalam Tabel 10, jabatan yang

diduduki merupakan jabatan penting dimana untuk jabatan tersebut perempuan sudah ada yang mengisinya di Kabupaten Luwu Timur 4 (empat) diantaranya diisi oleh perempuan untuk posisi Kepala Dinas/Badan, sedangkan untuk posisi eselon II adalah 37 orang. Walaupun dominan laki-laki masih terasa setidaknya sudah ada indikasi bahwa perempuan di Kabupaten Luwu Timur memiliki kesempatan yang sama dalam lembaga eksekutif. Posisi perempuan pada jabatan tersebut diharapkan dapat mengurangi bias gender karena perempuan memiliki kekuasaan dalam hal pengambilan keputusan, sehingga aspirasi perempuan dapat lebih tersalurkan karena ada partisipasi langsung pada posisi yang strategis.

Tabel 4.10 Jumlah Pejabat Eksekutif Pemerintahan  
Di Kabupaten Luwu Timur

Jumlah							
Eselon II		Eselon III		Eselon IV		Non Eselon	
L	P	L	P	L	P	L	P
27	4	109	37	178	198	1199	2242

(Sumber: Profil Gender dan Anak Kabupaten Luwu Timur 2020)

Dari hasil analisis penelitian ditemukan bahwa kedudukan Pengarusutamaan Gender dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten Luwu Timur 2016–2021 diwujudkan dalam penggambaran kondisi, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan yang selalu memperhatikan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi laki-laki dan perempuan secara seimbang.

Perhatian terhadap akses, partisipasi, kontrol dan manfaat bagi laki-laki dan perempuan dalam setiap aspek dalam RPJMD diwujudkan dalam setiap aspek dalam perencanaan jangka menengah daerah tersebut. Penyusunan perencanaan yang mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender selalu

didasarkan pada data pilah. Pada setiap penyajian kondisi dan prediksi selalu memperhatikan data pilah gender dan isu gender yang berkembang berkaitan dengan kondisi data yang ada. Dalam wawancara dengan Reski Afrianti, selaku Kepala Seksi Kesetaraan Gender Kabupaten Luwu Timur, mengatakan bahwa:

Pengarusutamaan Gender dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten Luwu Timur memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam percepatan pemabangunan daerah. (Hasil wawancara oleh RA pada tanggal 22 April 2021).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan bagian dari proses pengarusutamaan gender di daerah, yaitu pada tahap perencanaan. RPJMD akan dijadikan acuan dalam menyusun rencana strategis (RENSTRA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan rencana pembangunan tahunan daerah (RKPD) dan rencana kerja (RENJA) OPD. Dalam RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2016 – 2021 secara umum sudah memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Kedudukan Pengarusutamaan Gender dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan arus utama dalam setiap arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan. Pengarusutamaan gender akan menjadi jiwa dalam dokumen RKPD yang menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD untuk ditetapkan menjadi APBD. RAPBD disusun dengan mendasarkan pada Rencana Kerjadan Anggaran (RKA) seluruh OPD. APBD ini kemudian akan dijabarkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD.

Dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan tahunan, OPD perlu melakukan analisis gender, sehingga dapat diketahui permasalahan

kesenjangan gender menyangkut akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang diperoleh penduduk perempuan dan laki-laki, dan menentukan rencana aksi yang sesuai untuk memecahkan permasalahan tersebut. Kedudukan pengarusutamaan gender dalam pembangunan tahunan sangat penting dan harus dimulai sejak penyusunan RKPD Untuk diintegrasikan dalam strategi, kebijakan, program dan kegiatan. Titik kritis proses perencanaan pembangunan responsif gender terletak pada saat penyusunan RKA dan DPA OPD karena kedua dokumen penganggaran tersebut telah menyebutkan kelompok sasaran suatu kegiatan.

Oleh karena itu harus dipastikan bahwa sasaran pembangunan telah memperhatikan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan gender, yaitu memperhatikan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dari hasil pembangunan daerah yang setara bagi perempuan dan laki-laki baik kelompok lansia, difabel dan kelompok ekonomi terpinggirkan di dalam masyarakat.

Dalam penelitian ini, indikator kesetaraan gender terhadap kemajuan pembangunan daerah di Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur, yaitu:

#### 1. Akses

Akses merupakan indikator yang memperlihatkan apakah intervensi pembangunan memberi ruang atau membuka pintu bagi laki-laki dan perempuan untuk terlibat dan mendapatkan manfaat dari intervensi tersebut.

Akses salah satu faktor yang diperlukan untuk mengukur seberapa besar peluang atau kesempatan bagi perempuan dan laki-laki untuk

memanfaatkan sumber daya, baik sumber daya alam, sosial, politik maupun waktu. (Widjajanti, 2016)

Akses perempuan dalam kemajuan pembangunan didasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Gender Pengarusutamaan di Daerah. Membangun komitmen dibuktikan dengan dibuatnya berbagai peraturan dan undang-undang yang dapat mendukung tercapainya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan daerah. Hasil wawancara dengan Reski Afrianti, selaku Kepala Seksi Kesetaraan Gender Kabupaten. Luwu Timur, mengatakan bahwa:

Akses dalam mewujudkan kesetaraan gender di Kabupaten Luwu Timur yaitu Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah, Peraturan Bupati Nomor 4 tahun 2016 tentang Kegiatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). (Hasil wawancara oleh RA pada tanggal 22 April 2021).

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan, dirumuskan strategi kebijakan pemberdayaan perempuan dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Selain itu, konsep gender juga ditetapkan sebagai salah satu prinsip utama yang harus diarusutamakan dalam semua program/kegiatan pembangunan.

Sasaran kebijakan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang

menekankan pentingnya Strategi Gender yang digunakan untuk mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan memperoleh manfaat pembangunan, memiliki kendali atas sumber daya, dan berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Keberadaan kebijakan, peraturan dan undang-undang dalam mewujudkan kesetaraan gender sangat strategis ditambah dengan adanya lembaga pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) yang dibentuk dari tingkat Nasional hingga tingkat Desa. Hasil wawancara dengan Ibu Asriani Safitra Ridwan selaku Ketua TP PKK Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, mengatakan bahwa:

PKK merupakan salah satu akses untuk mendukung pembangunan dan keahlian berorganisasi bagi perempuan, khususnya perempuan di Kecamatan Tomoni dengan harapan PKK dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah sekaligus wadah bagi perempuan untuk mengembangkan gagasan dalam bentuk program. Oleh karena itu, keterlibatan perempuan dalam PKK khususnya di Kecamatan Tomoni sangat diharapkan untuk pembangunan daerah. (Hasil wawancara oleh AS pada tanggal 27 April 2021).

Senada dengan yang dituturkan oleh Hijrah selaku masyarakat kecamatan Tomoni, bahwa:

Dengan adanya PKK selaku wadah bagi para perempuan dapat berkontribusi dalam memajukan pembangunan daerah khususnya di Kecamatan Tomoni. (Hasil wawancara oleh H pada tanggal 10 Juni 2021).

Komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam melaksanakan komitmen Pengarusutamaan Gender dapat dianalisis dari pembuatan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati serta peraturan

lainnya dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Luwu Timur.

Dalam buku Profil Gender dan Anak Kab. Luwu Timur yang diterbitkan Dinas Sosial Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kab. Luwu Timur, diterangkan bahwa bentuk komitmen tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Perlindungan Anak
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan
- c. Bupati Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan
- d. Ranperda Kabupaten Luwu Timur tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Kekerasan

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur telah melaksanakan kebijakan kesetaraan gender yang tertuang dalam RPJMD 2016-2021 sebagai berikut:

- a. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 – 2021
- b. Penyusunan data terpilah jenis kelamin dalam bentuk narasi dalam gambaran umum RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2016-2021,

khususnya isu gender dalam isu prioritas daerah: pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

c. Isu kesetaraan gender sudah masuk dalam visi dan misi Kepala Daerah/Bupati/Wakil Bupati Luwu Timur terpilih (2016 – 2021).

Visi : Memimpin Luwu Timur 2021. Visi ini berarti pada tahun 2021 Luwu Timur menjadi daerah unggulan dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Sulawesi Selatan. Aspek yang menonjol dari Luwu Timur adalah daerah dan masyarakat Luwu Timur yang maju, sejahtera dan mandiri. Dalam perbendaharaan bahasa daerah, kondisi tersebut digambarkan dalam kalimat “Wanua Mappatuo Naewa i Alena”. Artinya, “negara mendukung rakyat dan memperkuat dirinya sendiri”. Kemajuan, kemakmuran, dan kemandirian dicapai melalui pembangunan ekonomi kerakyatan secara terpadu dan berkelanjutan berdasarkan sumber daya yang dimiliki daerah ini.

Dengan demikian, rumusan pernyataan visi ini memuat tiga visi utama, yaitu kemajuan, kemakmuran, dan kemandirian. Artinya Luwu Timur pada tahun 2021 akan unggul dibandingkan daerah lain di Sulawesi Selatan dalam hal kemajuan, kesejahteraan, dan kemandirian. Indikator umum sebagai daerah unggulan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Luwu Timur yang berada pada kategori menengah ke atas dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil

wawancara dengan Sri Endang selaku anggota PKK Kecamatan Tomoni mengatakan bahwa:

Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah merupakan akses bagi perempuan dalam beriktribusi dalam memajukan pembangunan daerah. (Hasil wawancara oleh SE pada tanggal 2 mei 2021).

Kebijakan-kebijakan diatas merupakan pintu akses dalam mewujudkan kesetaraan gender serta akses bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam memajukan pembangunan daerah. Setidaknya dengan adanya kebijakan atau peraturan pemerintah tentang Pengarusutamaan Gender memberikan kesempatan yang cukup besar bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan, khususnya kegiatan PKK sebagai wadah bagi perempuan, baik sebagai pembuat perencanaan maupun pengambil keputusan sebagai anggota masyarakat maupun sebagai penerima manfaat.

Dari hasil analisis data observasi di lapangan khususnya di Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur dapat dikatakan hampir tidak memiliki hambatan atau hambatan bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, baik dari segi kebijakan, budaya, budaya, norma, adat istiadat, agama, lingkungan keluarga maupun lingkungan pada umumnya. Hal ini karena pemerintah telah memberikan ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam memajukan daerah. Hasil wawancara dengan Ibu Fitrianiingsih sebagai kader PKK di Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur, mengatakan bahwa:

Pemerintah Kecamatan Tomoni secara umum sangat mendukung gerakan PKK dan kegiatan yang diprogramkan juga dilakukan oleh PKK di Kabupaten Tomoni. Pemerintah Kabupaten Tomoni juga telah berupaya membantu Tim Mobilisasi PKK, baik dari segi dana, fasilitas (materi) maupun bantuan berupa pemikiran, motivasi. Dari bantuan tersebut, para penggerak PKK mampu menjalankan program yang direncanakan. Kemudian keikutsertaan para istri pejabat pemerintah menjadi Tim Penggerak PKK juga sangat membantu proses berjalannya lembaga PKK dan antusiasme warga/ibu rumah tangga untuk terlibat dalam lembaga PKK sangat membantu proses pelaksanaan program PKK. Kerjasama dari pihak-pihak tersebut masih terjalin erat sehingga PKK di Kabupaten Tomoni masih dapat eksis hingga saat ini. (Hasil wawancara oleh F pada tanggal 10 Mei 2021).

Senada dengan yang disampaikan oleh Fitri Hanafy selaku masyarakat Kecamatan Tomoni menuturkan dalam wawancara, bahwa:

Program utama PKK di Kecamatan Tomoni selama ini berjalan dengan lancar, karena pemerintah Kecamatan maupun pemerintah Desa di Kecamatan Tomoni mendukung sekaligus membantu memberikan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program-program PKK. (Hasil wawancara oleh FH pada tanggal 1 Juni).

Mengenai perhatian pemerintah Kecamatan Tomoni dalam program pemberdayaan perempuan dalam hal ini PKK dapat dilihat dari surat keputusan Kepala Kecamatan Tomoni tentang susunan pengurus PKK Kecamatan Tomoni, sebagai berikut:

Tabel 4.11. Susunan Pengurus PKK Kecamatan Tomoni

Dewan Pembina	Camat Tomoni	
Ketua	Asriani Safitrah Ridwan	
Wakil Ketua	Dwi Ernawati Aris	
Sekretaris	Sistianingsih Sapri	
Wakil Sekretaris	Purwestri Kariani	
Bendahara	Nurhayati	
POKJA I	Ketua	Hajrah
	Sekretaris	Nandayani Rulli
	Anggota	1. Rini Dedi
		2. Fitrianiingsih
	3. Sumini Karsimin	
	4. Eviani	
POKJA II	Ketua	Evaliana Irwan
	Sekretaris	Rohani Syahrir
	Anggota	1. Sawen Samidi
		2. Sri Endang
	3. Hj. Nani	
	4. Ni Nyoman Karti I Ketut Ketung	
POKJA III	Ketua	Dra. Astuti
	Sekretaris	Sevi Safitri Syam
	Anggota	Hj. Suhe
		1. Andi Irmayanti Nasruddin
	2. Maya	

		3. Musmi M
POKJA IV	Ketua	Sutinah Suwito
	Sekretaris	Budianti Yusuf
	Anggota	1. Jawari Rahmat
		2. Akno Adrianto
		3. Sumiatun Abdul Fattah
4. Agata Kristiani		

(Sumber: Dokumen SK Pengurus PKK Kecamatan Tomoni, 2020)

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perempuan telah diberikan akses atau izin untuk terlibat dalam memajukan pembangunan daerah melalui PKK dan dengan kebijakan pemerintah yang telah mencanangkan strategi pembangunan yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap semua kebijakan, program dan kegiatan diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

## 2. Partisipasi

Partisipasi merupakan indikator yang menunjukkan apakah laki-laki dan perempuan terlibat secara nyata dalam proses intervensi tersebut. Partisipasi ialah pelibatan atau keterwakilan yang sama antara perempuan dan laki-laki dalam program, kegiatan, dalam pengambilan keputusan dalam pembangunan. (Widjajanti, 2016). Hasil wawancara dengan Rezki Afrianti

selaku kepala Seksi Kesetaraan Gender Kabupaten Luwu Timur mengatakan bahwa:

Pkk merupakan wadah untuk mengembangkan masyarakat melalui program-program yang disusun dan dilaksanakan, oleh karenanya partisipasi masyarakat khususnya perempuan dalam pelaksanaan program pkk sangat diperlukan. (Hasil wawancara oleh RA pada tanggal 22 April 2021).

Partisipasi perempuan merupakan keterlibatan dalam kegiatan Program Kesejahteraan Keluarga (PKK) untuk meningkatkan pendapatan keluarga bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat perempuan dilapisan masyarakat. Dalam konsep pemberdayaan perempuan menekankan pada proses memberikan kemampuan kepada perempuan agar menjadi berdaya, mendorong dan memotivasi setiap individu mempunyai kemampuan untuk menentukan pilihan hidupnya. Pemberdayaan perempuan ditujukan pada kelompok atau lapisan masyarakat yang tertinggal merupakan upaya untuk mendirikan perempuan lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Hasil wawancara dengan Hijrah selaku anggota PKK Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur, mengatakan bahwa:

Perempuan yang bergabung di PKK di Kecamatan Tomoni sangat antusias dalam melaksanakan program-program PKK yang tentunya dapat mendukung kemajuan pembangunan daerah. (Hasil wawancara oleh H pada tanggal 27 April 2021).

Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian teori bahwa partisipasi perempuan dalam pembangunan sangat didukung melalui beberapa indikator penting yang menjadi barometer dalam menentukan tingkat partisipasi perempuan dalam kemajuan pembangunan daerah, bagian ini

akan memaparkan hasil penelitian yang diperoleh berdasarkan observasi dan wawancara dengan informan dilokasi penelitian.

Penelitian dilakukan terhadap kaum perempuan, khususnya yang terlibat dalam PKK Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur untuk melihat seberapa besar kontribusi mereka dalam membantu kemajuan pembangunan daerah di Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur. Temuan penelitian dan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa informan yang mewakili perempuan untuk mengukur tingkat partisipasi perempuan dalam kemajuan pembangunan daerah.

Perempuan sebagai pelopor penggerak pembangunan yang diakomodasi melalui PKK. PKK yang merupakan gerakan pengembangan masyarakat melalui program-program yang disusun dan dilaksanakan. Hasil wawancara dengan Asriani Safitra Ridwan selaku Ketua TP PKK Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur, mengatakan bahwa:

Masyarakat di Kecamatan Tomoni khususnya para ibu-ibu yang berada di bawah naungan PKK, sebagian ikut melaksanakan program-program PKK dalam mendukung kemajuan pembangunan di Kec.Tomoni Kabupaten Luwu Timur, meski masih ada sebagian masyarakat yang menganggap PKK kurang diminati karena dianggap hanya diisi mayoritas oleh orang-orang tertentu saja. (Hasil wawancara oleh AS pada tanggal 27 April 2021).

Oleh karena itu, dari hasil wawancara dan observasi di lapangan diketahui bahwa partisipasi perempuan yang difasilitasi oleh PKK dapat mewujudkan kesetaraan gender yang kemudian dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan pembangunan daerah di kecamatan Tomoni

Kabupaten Luwu Timur. Dalam wawancara dengan Fitriyaningsih selaku kader PKK di Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur, bahwa:

Saya pribadi selaku kader PKK Kecamatan Tomoni selalu berpartisipasi dalam melaksanakan kegiatan PKK Kecamatan Tomoni dan begitupun sebagian masyarakat khususnya perempuan di Kecamatan Tomoni baik ditingkat kelurahan/Desa walaupun masih ada masyarakat kurang berminat dengan kegiatan PKK dengan alasan tidak digaji. (Hasil wawancara oleh F pada tanggal 10 Mei 2021).

Senada dengan yang yang disampaikan oleh Fitri Hanafy selaku masyarakat kecamatan Tomoni, bahwa:

Sebagai masyarakat Kecamatan Tomoni sudah semestinya ikut serta dalam melaksanakan kegiatan PKK Kecamatan Tomoni dengan harapan dapat memberikan kontribusi dalam memajukan Daerah. (Hasil wawancara oleh FH pada tanggal 1 Juni 2021).

Partisipasi perempuan dalam setiap pelaksanaan program kegiatan PKK merupakan tindakan nyata dalam memajukan pembangunan daerah khususnya di Kecamatan Tomoni, karena program utama PKK di Kecamatan Tomoni merupakan bagian dari pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga yang merupakan gerakan nasional pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolannya dari, oleh, dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia yang berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, berkesejahteraan dan berkeadilan gender serta berkesadaran hukum dan lingkungan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 pasal 5 ayat 2, kesetaraan gender menuju kemajuan pembangunan daerah melalui peran PKK dilakukan dengan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK antara lain:

Memahami dan Mengamalkan Pancasila, Gotong Royong, Pangan, Sandang, Perumahan dan pengelolaan rumah tangga, pendidikan dan keterampilan, kesehatan, pengembangan kehidupan gotong royong, kelestarian lingkungan, dan perencanaan yang sehat. Kegiatan 10 (sepuluh) program pokok PKK dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa 10 (sepuluh) program utama PKK telah direalisasikan di Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur walaupun masih belum optimal. Seperti hasil wawancara dengan Sri Endang selaku anggota PKK Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur, bahwa:

Pelaksanaan program utama PKK di kecamatan Tomoni selama ini berjalan dengan lancar, karena sebagian besar anggota PKK telah berpartisipasi dalam mewujudkan dan mengawal program PKK khususnya di kecamatan dan desa di seluruh kecamatan Tomoni. (Hasil wawancara oleh SE pada tanggal 2 Mei 2021).

Partisipasi masyarakat dalam program PKK Kecamatan Tomoni kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.12. Data Umum PKK Kecamatan Tomoni

No	Nama Desa	Jumlah Kader					
		Ang TP PKK		Umum		Khusus	
		L	P	L	P	L	P
1	Kelurahan Tomoni	0	38	0	38	0	36
2	Tadulako	0	25	0	25	0	18
3	Bangun Karya	0	38	0	38	0	23
4	Bayondo	0	38	0	38	0	23
5	Beringin Jaya	0	40	0	40	0	24
6	Lestari	0	45	0	45	0	26
7	Mulyasri	0	24	0	24	0	23
8	Bangun Jaya	0	40	0	40	0	39
9	Mandiri	0	28	0	28	0	25
10	Sumber Alam	0	40	0	40	0	38
11	Kalpataru	0	30	0	30	0	30
12	Rante Mario	0	40	0	40	0	35
13	Ujung Baru	0	30	0	30	0	24
Kecamatan Tomoni		0	29	0	29	0	12

(Sumber: Dokumen PKK Kecamatan Tomoni, 2020)

Partisipasi perempuan dalam kepemimpinan di Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur cukup tinggi, terbukti dengan adanya kegiatan yaitu program PKK. Kegiatan rutin TP PKK terdiri dari kelompok PKK khusus di Kecamatan Tomoni dari setiap Kecamatan dan Desa se-Kecamatan Tomoni dan dilaksanakan setiap 3 bulan sekali yang diketuai oleh Asriani Safitra Ridwan. Rapat rutin tim penggerak PKK, masing-masing pokja menyampaikan programnya yang sasarannya adalah kelompok TP PKK,

Kelurahan/Desa di Kecamatan Tomoni sebagai sarana diskusi untuk menyampaikan kepada masyarakat, apa yang didapat dari hasil menghadiri pertemuan rutin. Kegiatan PKK yang dilakukan selama ini di seluruh kecamatan/desa di Tomoni adalah kegiatan pendidikan keterampilan, gotong royong, pengembangan kehidupan koperasi, pangan, kesehatan, kelestarian lingkungan dan perencanaan schat.

### 3. Kontrol

Kontrol merupakan indikator yang menunjukkan apakah laki-laki dan perempuan mampu mempengaruhi pengambilan keputusan terkait dengan intervensi tersebut. Kontrol adalah fungsi manajemen untuk mengendalikan/ memastikan apakah sumber daya manusia telah bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya atau tidak, dan memastikan bahwa semua sumber daya manusia telah melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga akan tercapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. (Widjajanti, 2016)

Kontrol adalah alat untuk mengendalikan, memerintah dan mengatur keadaan dari suatu system. Kontrol sering diartikan sebagai pengawasan ataupunendalian, kontrol menjadi salah satu nilai dalam masyarakat, pada hakikatnya dalam kehidupan masyarakat perlu ada keseimbangan, supaya kehidupan masyarakat tercipta sesuana tertib aman dan damai sesuai dengan tujuan hidup bersama.

Pada tahap pelaksanaan pembangunan daerah, Pengarusutamaan Gender harus tetap menjadi ruh dan inti dari setiap kegiatan yang dilakukan. Secara umum dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Luwu Timur, Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja) harus menjadi pengendali agar kegiatan pembangunan tetap memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Koordinator Pokja Pengarusutamaan Gender juga harus selalu memantau agar pengarusutamaan gender berjalan dengan optimal, Pokja Pengarusutamaan Gender beserta tim teknis Pokja Pengarusutamaan Gender dan *Focal Point* menjadi pengawal dan pengawas serta supervisor yang memimpin dalam mengawal pengarusutamaan gender di Kabupaten Luwu Timur.

Pengendalian merupakan kegiatan yang sangat penting bagi pembangunan daerah, termasuk kesetaraan gender dalam hal ini pelaksanaan program PKK di Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur. Dari hasil observasi diketahui bahwa pengendalian salah satu agenda yang selalu dilakukan di PKK Kecamatan Tomoni untuk mengevaluasi program yang telah dilaksanakan dan program yang belum dilaksanakan. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Asriani Safitra Ridwan selaku Ketua TP PKK Kecamatan Tomoni dalam wawancaranya, bahwa:

Untuk pengendalian, kami selalu melakukan monitoring dan evaluasi di setiap desa yang ada di kecamatan Tomoni dan ada waktu tertentu yaitu triwulan, kami mengundang PKK Kelurahan atau Desa untuk melaksanakan kegiatan rapat evaluasi pengendalian kegiatan di masing-masing Kelurahan dan Desa. (Hasil wawancara oleh AS pada tanggal 27 April 2021).

Senada dengan yang dituturkan oleh Hijrah selaku masyarakat di Kecamatan Tomoni, bahwa:

Pengurus PKK di Kecamatan Tomoni setiap triwulan memiliki jadwal untuk monitoring dan mengevaluasi program PKK baik ditingkat kecamatan maupun kelurahan/desa scKecamatan Tomoni. (Hasil wawancara oleh H pada tanggal 10 Juni 2021).

Kontrol atau pengendalian salah satu agenda yang selalu dilakukan di PKK Kecamatan Tomoni untuk mengevaluasi program baik yang sudah terlaksana maupun yang belum terlaksana, sementara jadwal evaluasi program PKK dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.13 Jadwal Evaluasi Program PKK Kecamatan Tomoni

<b>Jadwal Rapat Evaluasi Program PKK Kecamatan Tomoni</b>				
Bulan	Maret	Juni	September	Desember
Peserta	Pokja I	Pokja I	Pokja I	Pokja I
	Pokja II	Pokja II	Pokja II	Pokja II
	Pokja III	Pokja III	Pokja III	Pokja III
	Pokja IV/ PKK Kel/Desa	Pokja IV/ PKK Kel/Desa	Pokja IV/ PKK Kel/Desa	Pokja IV/ PKK Kel/Desa

(Sumber: Dokumen PKK Kecamatan Tomoni, 2020)

Dari hasil wawancara dan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa TP PKK Kecamatan Tomoni melakukan penertiban program PKK di kecamatan dan desa di seluruh Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur yang pelaksanaannya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Kontrol atau pengendalian adalah rangkaian kegiatan pengelolaan yang dimaksudkan untuk memastikan agar suatu program/kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian program PKK juga dilakukan oleh TP PKK Kabupaten Luwu Timur, hasil wawancara dengan Ibu Reski

Afrianti selaku Kepala Seksi Kesetaraan Gender Kabupaten Luwu Timur menyatakan bahwa:

Pengendalian yang dilakukan adalah dengan mengevaluasi hasil program yang dilaksanakan, dari hasil evaluasi tersebut dapat diketahui perkembangannya yang dilakukan setiap triwulan atau 4 (empat) kali dalam setahun. (Hasil wawancara oleh RA pada tanggal 22 April 2021).

Senada dengan yang disampaikan oleh Fitriyaningsih selaku kader PKK Kecamatan Tomoni, bahwa:

Selama ini, kontrol yang dilakukan yaitu mengevaluasi hasil program yang telah dilaksanakan, yang selanjutnya selah di evaluasi program maka tentu sudah dapat di lihat kendala-kendala ataupun program yang belum terlaksana. (Hasil wawancara oleh F pada tanggal 10 Mei 2021).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, bahwa PKK Kabupaten Luwu Timur juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan sebagai kontrol terhadap pelaksanaan program PKK apakah dapat mencapai target yang diharapkan. Tanpa adanya evaluasi dan monitoring, TP PKK tentu tidak bisa dinilai seberapa sukses program tersebut. Hasil evaluasi ini akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan di masa yang akan datang. Hasil wawancara dengan Ibu Fitri Hanafy selaku masyarakat Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur menyatakan bahwa:

Salah satu kegiatan baik kegiatan apapun termasuk di PKK yang penting adalah mengevaluasi program kerja PKK itu sendiri, apakah programnya sudah terlaksana sesuai perencanaan atau belum. (Hasil wawancara oleh FH pada tanggal 1 Juni 2021).

Selain itu, laporan pertanggungjawaban juga merupakan bagian dari pengendalian program PKK di Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur. Laporan pelaksanaan kegiatan adalah laporan yang memuat tujuan, manfaat, fungsi, dan isi kegiatan dari awal sampai akhir secara rinci. Dari hasil observasi, peneliti menggali informasi terkait bagaimana proses pertanggung jawaban oleh PKK Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur dan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Asriani Safitra Ridwan sebagai berikut:

Sejauh ini sudah berjalan dengan baik sesuai jadwal dalam penyelesaian berkas/dokumen yang akan diserahkan untuk pertanggung jawaban keuangan untuk proses keuangan selanjutnya. (Hasil wawancara oleh AS pada tanggal 27 April 2021).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, sejauh ini PKK Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur telah melaksanakan tertib administrasi, baik administrasi di sekretariat maupun administrasi keuangan, telah dilaksanakan dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan dan pedoman PKK hasil Rakernas VII tahun 2010. Melalui administrasi, kemajuan suatu program dapat diukur melalui data yang tepat sesuai administrasi yang baik dan tertib. Hasil wawancara peneliti dengan Sri Endang selaku kader PKK di Kecamatan Tomoni sebagai berikut:

Salah satu kontrol dalam pelaksanaan program PKK di kecamatan Tomoni yaitu dengan melengkapi administrasi termasuk laporan pertanggung jawaban kegiatan. (Hasil wawancara oleh SE pada tanggal 2 Mei 2021).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, tahap Kontrol/ pengendalian Pengarusutamaan Gender di Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur menjadi mainstream dalam pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah. Pada tahap pelaporan pelaksanaan pembangunan, Pengarusutamaan Gender menjadi jiwa dalam substansi laporan pelaksanaan pembangunan daerah.

#### 4. Manfaat

Manfaat merupakan indikator yang mengangkat apakah intervensi itu menguntungkan laki-laki dan perempuan. Manfaat juga dapat di artikan sebagai hal atau cara hasil kerja dalam pemanfaatan sesuatu yang berguna, manfaat-manfaat yang di peroleh itu tentunya akan menyebabkan perubahan terhadap suatu fungsi tertentu. (Widjajanti, 2016).

Manfaat juga dapat diartikan sebagai hal atau cara hasil kerja dalam pemanfaatan sesuatu yang berguna, manfaat-manfaat yang di peroleh itu tentunya akan menyebabkan perubahan terhadap suatu fungsi tertentu.

Dalam wawancara bersama Riski Afrianti mengatakan bahwa:

Manfaat dari kegiatan PKK yaitu dapat memberikan pengalaman berupa pelaksanaan sepuluh program utama yang kemudian dapat dikembangkan oleh anggotanya sesuai dengan potensi dan sumber daya yang ada. (Hasil wawancara oleh RA pada tanggal 22 April 2021).

Senada dengan yang dituturkan oleh Fitri Hanafy selaku masyarakat di Kecamatan Tomoni, bahwa:

PKK dapat mengembangkan kreatifitas perempuan sebab ada pelatihan keterampilan supaya dapat lebih kreatif. (Hasil wawancara oleh FH pada tanggal 1 Juni 2021).

Untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dapat dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat melalui gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Sesuai dengan pasal 1 ayat 5 Gerakan Kesejahteraan dan Pemberdayaan Keluarga yang selanjutnya disingkat Gerakan PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah kepengurusan dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat dan sejahtera, maju dan mandiri, keadilan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan. Pasal 2 Pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK adalah upaya menjadikan masyarakat mandiri dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi pekerti, sehat dan sejahtera, maju dan mandiri. dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

Kesetaraan gender melalui pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) merupakan forum yang disediakan oleh pemerintah untuk perempuan. Pengelolaannya dimulai dari lingkup paling bawah berupa satuan pokok kerja (pokja) hingga tingkat nasional di bawah naungan Menteri Dalam Negeri. PKK juga dikelola oleh perempuan yang

menunjukkan bahwa pemerintah memberikan kesempatan kepada perempuan untuk berpartisipasi aktif.

Manfaat yang diperoleh dari kegiatan PKK dalam mewujudkan ketaraan gender dapat dimanfaatkan secara langsung oleh perempuan yang tergabung dalam PKK disemua tingkatan. Dalam PKK perempuan manapun, apapun latar belakang pendidikan, agama, dan bersuku apapun diperbolehkan mengikuti setiap kegiatan. PKK hanya memberikan pengalaman berupa pelaksanaan sepuluh program utama yang kemudian dapat dikembangkan oleh anggotanya sesuai dengan potensi dan sumber daya yang ada di masing-masing daerah. Dalam wawancara bersama Ibu Hijrah selaku masyarakat kecamatan Tomoni mengatakan bahwa:

PKK di Kecamatan Tomoni bermanfaat bagi perempuan untuk mengembangkan kreatifitasnya karena ada pelatihan keterampilan untuk melatih kemampuan ibu-ibu agar kreatif dan juga dapat menggali potensi yang ada pada masyarakat khususnya di Kecamatan Tomoni. (Hasil wawancara oleh H pada tanggal 10 Juni 2021).

Pelaksanaan program PKK dilakukan secara optimal dalam menggerakkan masyarakat khususnya perempuan agar pelaksanaan program dapat efisien dan memberikan manfaat dalam pengarusutamaan gender melalui Program Pemberdayaan Keluarga Sejahtera (PKK).

Adapun manfaat yang diperoleh dari program PKK Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur dijabarkan dalam tugas dan fungsi Organisasi Tim Penggerak PKK dengan membentuk kelompok kerja dengan ketentuan khusus. Wawancara dengan Fitrianiingsih selaku anggota PKK Kecamatan Tomoni mengatakan bahwa:

Program PKK di Kecamatan Tomoni sangat bermanfaat karena memberikan pelatihan keterampilan untuk melatih kemampuan ibu-ibu agar kreatif dan sekaligus menggali potensi yang ada di masyarakat Kecamatan Tomoni. (Hasil wawancara oleh F pada tanggal 10 Mei 2021).

Manfaat pengarusutamaan gender melalui program PKK di Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur meliputi:

a. Kelompok Kerja (Pokja) I

Program Pokja I yaitu penghayatan dan pengamalan pancasila dan program gotong royong, hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.14 Program Pokja I PKK Kecamatan Tomoni

Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila				
PKBN	PKDRT	POLA ASUH	LANSIA	
Gotong Royong				
Kerja Bakti	Rukun Kematian	Keagamaan	Jimpitan	Arisan

(Sumber: Dokumen Program PKK Kecamatan Tomoni, diolah, 2020)

Tabel diatas dapat dilihat penanggung jawab pelaksanaan program penghayatan dan pengamalan pancasila dan program gotong royong, berdasarkan observasi program PKK Kecamatan Tomoni, program PKK di Kecamatan Tomoni telah memberikan pembinaan pemahaman peraturan dan perundang-undangan dan pelaksanaan program PKK Kecamatan Tomoni seperti kerja bakti, rukun kematian, keagamaan dan kelompok arisan. Kegiatan PKK ini dilakukan untuk mengajak ibu-ibu melakukan sadar akan pentingnya gotong royong.

b. Kelompok Kerja (Pokja) II

Program Pokja II yaitu pendidikan keterampilan dan pengembangan kehidupan koperasi, hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.15 Progra Pokja II PKK Kecamatan Tomoni

Pendidikan Keterampilan									
Kelompok Belajar				BKB			Kader Khusus		
Pkt A	Pkt B	Pkt C	Paud	Taman Bacaan	Ape (Set)	Klp Simulasi Bkb	Tutor	Bkb	Keterampilan
Pengembangan Kehidupan Berkoperasi									
Pra Koperasi Usaha Bersama UP2K						Koperasi Berbadan Hukum			

(Sumber: Dokumen Program PKK Kecamatan Tomoni, diolah, 2020)

Tabel diatas dapat dilihat penanggung jawab pelaksanaan Program Pendidikan Keterampilan dan Pengembangan Kehidupan Koperasi, berdasarkan observasi program PKK, Kecamatan Tomoni telah melakukan kelompok belajar dan Pendataan Literasi PAUD di Kabupaten Tomoni untuk mengetahui jumlah lembaga PAUD di Kecamatan Tomoni dan kegiatan pelatihan oleh PKK Kecamatan Tomoni tentunya bisa dimanfaatkan oleh ibu-ibu rumah tangga.

c. Kelompok Kerja (Pokja) III

Program Pokja III yaitu pangan, sandang, perumahan dan pengelolaan rumah tangga, hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.16 Progra Pokja III PKK Kecamatan Tomoni

<b>Sandang Pangan</b>					
<b>Pemanfaatan Pekarangan / Hatinya Pkk</b>					
Peternakan	Perikanan	Warung Hidup	Toga	Lumbung Hidup	Tanaman Keras

(Sumber: Dokumen Program PKK Kecamatan Tomoni, diolah, 2020)

Tabel diatas dapat dilihat penanggung jawab pelaksanaan program pangan, sandang, perumahan dan pengelolaan rumah tangga, yang berdasarkan pengamatan terhadap program PKK Kecamatan Tomoni yang telah melaksanakan kegiatan pemanfaatan pekarangan rumah yang ditanami tanaman Toga dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya kebersihan dan kesehatan, pengelolaan lingkungan yang sehat, dan pemanfaatan pekarangan seperti peternakan, perkebunan, kandang ternak untuk meningkatkan kreatififan ibu-ibu PKK dalam mengelola pangan lokal. Kegiatan ini sejalan dengan misi PKK di Kecamatan Tomoni yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas pangan keluarga.

d. Kelompok Kerja (Pokja) IV

Program Pokja IV yaitu keschatan, kelestarian lingkungan dan perencanaan sehat, hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.17 Program Pokja IV PKK Kecamatan Tomoni

<b>Kesehatan, Kelestarian Lingkungan Hidup, Perencanaan Sehat</b>					
Posyandu	Gizi	Kesling	Penyuluhan Norkoba	PHBS	KB

(Sumber: Dokumen Program PKK Kecamatan Tomoni, diolah, 2020)

Tabel diatas dapat dilihat penanggung jawab pelaksanaan program kesehatan, kelestarian lingkungan dan perencanaan sehat, berdasarkan hasil observasi program PKK Kecamatan Tomoni telah melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan seperti penguatan keluarga sadar gizi, penyuluhan tentang pentingnya imunisasi bagi ibu, bayi dan ibu hamil yang bertujuan untuk meningkatkan imunisasi sebagai kebutuhan dasar bayi dan TP PKK Kecamatan Tomoni berperan aktif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Asriani Safitra Ridwan selaku ketua TP PKK Kecamatan Tomoni menyatakan bahwa:

Semua kegiatan berada di bawah naungan Pokja PKK masing-masing dimana masing-masing kelompok kerja menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Dalam program ini, PKK selalu memberikan pelatihan keterampilan untuk melatih kemampuan ibu-ibu agar kreatif dan juga dapat menggali potensi yang ada pada masyarakat desa se-Kecamatan Tomoni. (Hasil wawancara oleh AS pada tanggal 27 April 2021).

Senada dengan yang disampaikan oleh Sri Endang selaku anggota PKK di Kecamatan Tomoni, bahwa:

Kelompok kerja atau pokja bertanggung jawab menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing termasuk dalam pelaksanaan program kerja pembinaan dan pelatihan keterampilan sehingga program itu dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. (Hasil wawancara oleh SE pada tanggal 2 Mei 2021)

Pengurus PKK dalam menjalankan tugas dan fungsinya, terlihat bahwa kegiatan PKK dalam rangka pembinaan kepada ibu-ibu dan anggota PKK sendiri di Kecamatan Tomoni dilaksanakan walaupun masih terbatas terutama dalam kegiatan pelatihan pemberdayaan perempuan.

Dalam pelaksanaan program PKK, mereka yang tergabung dalam pokja dari Pokja I hingga Pokja IV dituntut untuk kreatif dan inovatif. Misalnya dalam memberikan pelatihan, kursus, dan kegiatan lainnya dalam mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, tentunya semuanya tidak lepas dari tujuan PKK yaitu meningkatkan kesejahteraan keluarga dan pendapatan keluarga.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian maka peneliti menyimpulkan bahwa dari segi Akses atau izin untuk terlibat dalam memajukan pembangunan daerah dengan kebijakan pemerintah yang telah mencangkan strategi pembangunan yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dan lewat struktur organisasi ini juga mengajak kepada masyarakat agar dapat berperan aktif dalam kegiatan PKK di Kecamatan Tomoni, dari segi Partisipasi bahwa perempuan di Kecamatan Tomoni tingkat partisipasinya sangat tinggi sehingga program-program PKK di Kecamatan Tomoni dapat terlaksana dengan baik dan dari segi Kontrol dimana organisasi tersebut telah menjalankan kontrol dengan baik setiap empat bulan sekali atau pertriwulan. Tanpa adanya evaluasi dan monitoring TP PKK tentu tidak bisa dinilai seberapa sukses program tersebut. Manfaat yang diperoleh dari kegiatan PKK dalam mewujudkan kesetaraan gender dapat dimanfaatkan secara langsung oleh perempuan yang tergabung dalam PKK disemua tingkatan. Pelaksanaan program PKK dilakukan secara optimal dalam menggerakkan masyarakat khususnya perempuan agar pelaksanaan program dapat efisien dan memberikan manfaat dalam pengarusutamaan gender melalui Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

## B. Saran

Adapun saran yang disampaikan dalam penelitian ini yaitu pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten pada umumnya agar lebih meningkatkan perhatiannya dalam memberikan akses kepada perempuan demi kemajuan pembangunan daerah sehingga kaum perempuan di Kecamatan Tomoni dapat semakin meningkatkan partisipasinya dan kontrol atau monitoring dalam pelaksanaan program PKK dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat terutama bagi perempuan didaerah Kecamatan Tomoni.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. (2016). *Pembangunan Gender dan Benturan Tradisi*. *SOCIUS: Jurnal Sosiologi*. <http://journal.unhas.ac.id/index.php/socius/article/view/394>
- Aida S. Hubeis. (2011.) *Pemberdayaan Perempuan dari Masa ke Masa*. Jakarta: Pt penerbit IPB Press
- Alfian, R. (2016). *Pengantar Gender dan Feminisme*. Yogyakarta: Garudhawaca
- Achmad, S. (2019). *Membangun pendidikan berwawasan gender*. Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan anak <http://www.ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/yinyang/article/view/28>
- Badan Pusat Statistika Kabupaten Luwu Timur. (2020). *Kota Makassar* (Vol. 15).
- Bungin. Burhan. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada
- Ema, T. (2016) *Pembangunan Manusia Berbasis Gender*. Jakarta: CV. Lintas Khatulistiwa
- Effendi, P., & Ratnasari, D. (2018). *Kesetaraan gender dalam prespektif undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan*. *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian* <http://journal.unigres.ac.id/index.php/JurnalProHukum/article/view/701>
- Mosse, Julia Cleves (2018). *Gender dan Pembangunan*. Jogjakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Mutrofin, M., & Irvan, M. (2019). *Dampak Bias Gender Terhadap Profesi Keguruan*. [repository.unej.ac.id.https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/80410](https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/80410)
- Nurkholis, A. (2018). *Teori pembangunan sumberdaya manusia: Human Capital Theory, Human Investment Theory, Human Development Theory, Sustainable Development* [osf.io. https://osf.io/preprints/inarxiv/8trv7/](https://osf.io/preprints/inarxiv/8trv7/)
- Probosiwi, R. (2015). *Perempuan Dan Perannya Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial (Women and Its Role on Social Welfare Development)*. *Jurnal Natapraja: Kajian Ilmu Administrasi Negara*.

<https://journal.uny.ac.id/index.php/natapraja/article/view/11957>

Suhita, D. (2015). Upaya Mengatasi Permasalahan Jender Dalam Pembangunan. In *Transformasi*.  
ejurnal.unisri.ac.id.

<http://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Transformasi/article/viewFile/911/763>

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, Cv.

Widjajanti, M. Santoso. (2016). *Penelitian dan Pengarusutamaan Gender: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Lipi Press.

Peraturan Menteri Republik Indonesian nomor 1 tahun 2011 tentang strategi nasional sosial budaya untuk mewujudkan kesetaraan gender.

Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional.

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 15 tahun 2008 tentang pedoman umum gender pengarusutamaan di daerah

Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2018 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah.

<https://koranseruya.com/orgamisasi-perempuan-di-lutim-di-bekali-pembinaan.html>.  
Di akses pada tanggal 5 September 2020 pukul 20.00 Wita.

<https://antarenews.com/berita/puspawati-Husler-minta-pkk-lutim-berperan-dalam-pembangunan>. Diakses pada tanggal 1 Januari 2021 pukul 14.30 Wita.

L

A

M

P

I

R

A

N





UNIVERSITAS  
Muhammadiyah  
Makassar

Faculty of Social and Political Sciences  
Department of Public Administration  
Jl. Bontomatene No. 2, Makassar  
Telp. (0411) 4511000

PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
No. 0353/A-III/III/1942/2021

Berdasarkan usulan judul penulisan skripsi mahasiswa tentang rencana judul dan susunan pembimbing mahasiswa dan telah disetujui Ketua Jurusan Dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unismuh Makassar menugaskan pengajar yang namanya tersebut di bawah ini sebagai pembimbing penulisan skripsi saudara

Nama Elsa Purwaningsih

Stambuk 105641101817

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Dengan Rencana Judul Skripsi

*"Perspektif Kesetaraan Gender terhadap Kemajuan Pembangunan Daerah di Kabupaten Luwu Timur"*

Pembimbing I Dr. Hj. Budi Setiawati, M.Si  
Pembimbing II Ahmad Harakan, S.IP, M.HI

Tugas ini hendaknya dilaksanakan secara sistematis, berkesinambungan dan bertanggungjawab, serta dilakukan evaluasi secara berkala tentang kemajuan dan hasil penulisan yang telah dicapai

Ditetapkan di Makassar  
Pada Tanggal 15 Maret 2021  
Dekan

  
Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si  
NBM 730727

Tembusan Kepada Yth,

- 1 Pembimbing I
- 2 Pembimbing II
- 3 Ketua Jurusan
- 4 Mahasiswa yang bersangkutan
- 5 Arsip



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp. 866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 E-mail : lp3um@umh@plasa.com



Nomor : 1513/05/C.4-VIII/IV/40/2021  
Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

21 Sya'ban 1442 H  
03 April 2021 M

Kepada Yth,  
Bapak / Ibu Bupati Luwu Timur  
Cq. Ka. Badan Kesbang, Politik & Linmas  
di -  
Luwu Timur

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor 0336/FSE/A.I-VIII/IV/42/2021 tanggal 3 April 2021 menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : ELSA PURWANINGSIH  
No. Stambuk : 105641101817  
Fakultas : Fakultas Sosial dan Politik  
Jurusan : Ilmu Pemerintahan  
Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Perspektif Kesetaraan Gender Terhadap Kemajuan Pembangunan Daerah di Kabupaten Luwu Timur"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 3 April 2021 s/d 3 Juni 2021.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.  
Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziiraa.

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Ketua LP3M,



Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.

NBM 101 7716



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Soekarno-Hatta HP 08 12345 777 56  
email : kppt@luwutimurkab.go.id | website : dpmpptsp.luwutimurkab.go.id

MALILI, 92981

Malili, 14 April 2021

Nomor : 069/DPMPPTSP/IV/2021  
Lampiran :  
Perihal : Izin Penelitian

Kepada  
Yth Kepala Dinsos & P3A, Kecamatan Tomoni  
Di  
Kab. Luwu Timur

Berdasarkan Surat Rekomendasi Tim Teknis Tanggal 14 April 2021 Nomor 069/KesbangPol/IV/2021 tentang Izin Penelitian.

Dengan ini disampaikan bahwa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : ELSA PURWANINGSIH  
Alamat : Dsn. Sumber Aagung, Desa Lestari, Kecamatan Tomoni  
Tempat / Tgl Lahir : Lestari / 31 Mei 1999  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa  
Nomor Telepon : 082296788522  
Nomor Induk Mahasiswa : 105641101817  
Program Studi : Fakultas Sosial Dan Politik  
Lembaga : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Bermaksud melakukan Penelitian di daerah/instansi Bapak/Ibu sebagai syarat penyusunan Skripsi, dengan Judul:

**"PERSPEKTIF KESETARAAN GENDER TERHADAP KEMAJUAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN LUWU TIMUR."**

Mulai : 14 April 2021 s.d. 14 Juni 2021

Sehubungan hal tersebut di atas, pada prinsipnya Pemkab Luwu Timur dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan penelitian, kepada yang bersangkutan harus melapor kepada pemerintah setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Menaati semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, serta mengindahkan adat istiadat Daerah setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil "Laporan Kegiatan" selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah kegiatan dilaksanakan kepada Bupati Luwu Timur Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu Timur.
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin tidak menaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian disampaikan untuk diketahui.

A.n Bupati Luwu Timur  
Kepala DPMPPTSP

(Andi Habil Unru, SE)  
Pangkat : Pembina Tk.I



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
 Jl. Soekarno – Hatta, email : dinsosppalutim@gmail.com  
**MALILI 92981**

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**

Nomor : 480/1146/Dinsos P3A

Yang bertanda tangan di bawah ini :

**Nama** : Drs. AMIRUDDIN RUMAE  
**NIP** : 19650210 199303 1 015  
**Pangkat** : Pembina Tk. I /IV.b  
**Jabatan** : Sekretaris Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa Mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini telah melaksanakan penelitian pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak sejak tanggal 14 April 2021 s.d. 14 Juni 2021.

**Nama** : Elsa Purwaningsih  
**Nim** : 10584110817  
**Jurusan** : Ilmu Pemerintahan  
**Fakultas** : Sosial dan Politik  
**Judul Penelitian** : Perspektif Kesetaraan Gender terhadap Kemajuan Pembangunan Daerah di Kabupaten Luwu Timur

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malili, 18 Juni 2021

**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU**  
**DINAS KEBALA DINAS**  
**SEKRETARIS**  
  
**Dr. AMIRUDDIN RUMAE**  
 Pangkat : Pembina Tk I/IV-b  
 Nip. 10660103 199802 1 005

**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
KECAMATAN TOMONI**

Alamat: Jln Pamong Praja No. 02 Kode Pos 92972

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**

Nomor : 423.4/224 /KTM

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : UMAR HASAN DALLE, S. STP.M.SI  
NIP : 19810204 199912 1 001  
Pangkat : Pembina  
Jabatan : Camat Tomoni

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa Mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini telah melaksanakan penelitian pada Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak sejak tanggal 14 April 2021 s/d 14 Juni 2021.

Nama : Elsa Purwaningsih  
Nim : 10564110817  
Jurusan : Ilmu Pemerintahan  
Fakultas : Sosial dan Politik  
Judul Penelitian : Perspektif Kesetaraan Gender terhadap Kemajuan Pembangunan Daerah di Kabupaten Luwu Timur

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



**DOKUMENTASI**

Wawancara Bersama ibu Rezki Afrianti



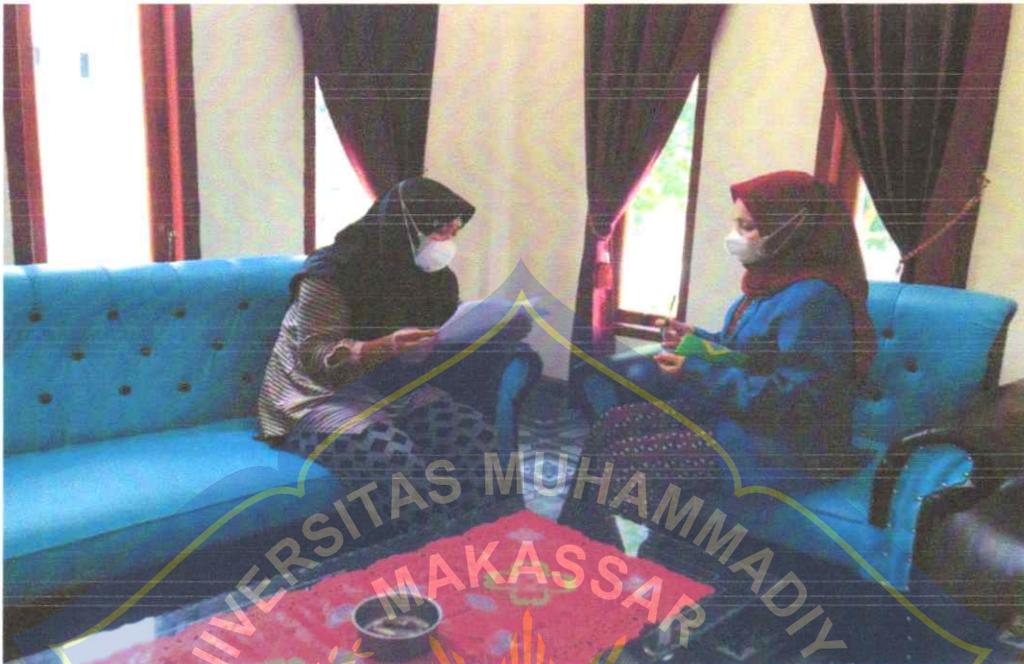
Wawancara Bersama Ibu Asriani Safitri Ridwan



Wawancara Bersama Ibu Sri Endang



Wawancara Bersama Ibu Fitrianiingsih



Wawancara Bersama Ibu Fitri Hanafy



Wawancara Bersama Ibu Hijrah

## RIWAYAT HIDUP PENULIS



**ELSA PURWANINGSIH**, lahir pada tanggal 31 Mei 1999 di Desa Lestari, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara yang terlahir dari buah cinta pasangan Saijo dan Sukati. Penulis memulai jenjang pendidikan formal dari SDN 170 Mulyasri, Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2005-2011, Kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Tomoni, Kabupaten Luwu Timur dan lulus pada tahun 2014. Ditahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 8 Luwu Timur dan lulus pada tahun 2017. Setelah menempuh jenjang pendidikan di bangku SMA penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Swasta dan terdaftar sebagai mahasiswa program srata satu Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar dan lulus pada tahun 2021 dengan predikat Cum Laude.

Berkat petunjuk yang Maha Kuasa serta Doa yang selalu dipanjatkan kedua orang tua tercinta juga bantuan serta bimbingan orang-orang baik yang sudah dihadirkan Allah SWT sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Perspektif Kesetaraan Gender Terhadap Kemajuan Pembangunan Daerah (Studi Kasus PKK Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur).